

**DIPLOMASI IKLIM MALADEWA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN
KENAIKAN PERMUKAAN LAUT PADA TAHUN 2018-2023**

(Skripsi)

Oleh

**EWANA LAURENSIA BR SINULINGGA
NPM 2216071147**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2026**

ABSTRAK

DIPLOMASI IKLIM MALADEWA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KENAIKAN PERMUKAAN LAUT PADA TAHUN 2018-2023

Oleh

EWANA LAURENSIA BR SINULINGGA

Perubahan iklim yang memicu kenaikan permukaan laut menjadi ancaman eksistensial bagi Maladewa sebagai negara kepulauan kecil dengan ketinggian daratan yang rendah. Kondisi tersebut mendorong Maladewa untuk memanfaatkan diplomasi sebagai instrumen dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut sekaligus memperjuangkan kepentingannya di tingkat internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan diplomasi iklim Maladewa dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut pada periode 2018-2023.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka. Data diperoleh dari dokumen resmi pemerintah Maladewa, laporan organisasi internasional, artikel jurnal dan media internasional yang relevan. Penelitian ini menggunakan konsep *climate diplomacy* yang berfokus pada diplomasi bilateral dan multilateral.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maladewa memanfaatkan diplomasi bilateral dan multilateral untuk memperoleh dukungan adaptasi sekaligus memperjuangkan keadilan iklim di tingkat global. Melalui diplomasi iklim, Maladewa berhasil mengubah kerentanannya terhadap perubahan iklim menjadi sumber legitimasi moral yang memperkuat posisi diplomatiknya dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan kepentingan negara-negara kepulauan kecil. Penelitian ini berkontribusi dalam menunjukkan bahwa negara kecil tetap dapat memiliki pengaruh dalam politik internasional melalui pemanfaatan diplomasi secara strategis.

Kata Kunci: Maladewa, Diplomasi Iklim, Kenaikan Permukaan Laut, Perubahan Iklim, *Small Island Developing States*.

ABSTRACT

CLIMATE DIPLOMACY OF THE MALDIVES IN ADDRESSING THE THREAT OF SEA LEVEL RISE (2018-2023)

By

EWANA LAURENSIA BR SINULINGGA

Climate change, which triggers sea-level rise, poses an existential threat to the Maldives, a small island nation with low lying land. This situation has prompted the Maldives to use diplomacy as an instrument to address the impacts of climate change and advance its international interest. This study aims to describe the Maldives' climate diplomacy in addressing the threat of sea level rise between 2018 and 2023. This research applied a descriptive qualitative method with a literature review technique. Data were obtained from official Maldivian government documents, international organization reports, journal articles, and relevant international media. This research employed the concept of climate diplomacy, focusing on bilateral and multilateral diplomacy. This study demonstrates that the Maldives utilizes multilateral and bilateral diplomacy as its primary strategy to address the threat of climate change. The research findings show that the Maldives utilizes bilateral and multilateral diplomacy to secure adaptation support while simultaneously championing climate justice at the global level. Through climate diplomacy, the Maldives has successfully transformed its vulnerability to climate change into a source of moral legitimacy, strengthening its position in advancing national interests and the interests of small island states. This research contributes to demonstrating that small states can still exert influence in international politics through the strategic use of diplomacy.

Keywords: Maladewa, Climate Diplomacy, Sea Level Rise, Climate Change, Small Island Developing States.

**DIPLOMASI IKLIM MALADEWA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN
KENAIKAN PERMUKAAN LAUT PADA TAHUN 2018-2023**

Oleh

EWANA LAURENSIA BR SINULINGGA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **DIPLOMASI IKLIM MALADEWA DALAM
MENGHADAPI ANCAMAN KENIKAN
PERMUKAAN LAUT PADA TAHUN 2018-2023**

Nama Mahasiswa

: **Ewana Laurensia Br Sinulingga**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2216071147

Jurusan

: **Hubungan Internasional**

Fakultas

: **Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



Dr. Arie Fitria, S.IP., MT., DEA.
NIP. 197809022002122007

Luerdi, S.IP., M.Si.
NIP. 198602222023211016

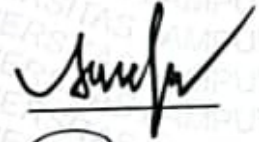
2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Arie Fitria, S.IP., MT., DEA.



Sekretaris : Luerdi, S.IP., M.Si.



Penguji Utama : Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si.
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Juni 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

BandarLampung, 2 Juni 2026
Yang membuat pernyataan



Ewana Laurensia Br Sinulingga
NPM. 2216071147

RIWAYAT HIDUP



Penulis dengan nama lengkap Ewana Laurensia Br Sinulingga, lahir di Kandibata pada tanggal 5 September 2003 dan merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari Bapak Efesus Sinulingga dan Ibu Weninta Anna Br Ginting. Penulis memulai pendidikan formal pertama di Sekolah Dasar (SD) Negeri 040464 Kandibata pada tahun 2009-2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kabanjahe pada tahun 2015-2018, kemudian dilanjutkan ke tingkat menengah atas di Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Katolik Kabanjahe pada tahun 2018-2021.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai salah satu mahasiswa program studi S-1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan kepanitiaan. Pada tahun 2023, penulis bergabung sebagai anggota bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) di Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) RAYA Universitas Lampung. Selain itu, penulis juga berkesempatan menjadi *Liaison Officer* (LO) dalam kegiatan Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PNMHII) ke-36. Selanjutnya, pada tahun 2025, penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN MBKM) di Desa Way Gelam, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan selama 30 hari sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

MOTTO

“So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand.”

(Isaiah 41:10)

“Surely there is a future, and your hope will not be cut off.”

(Proverbs 23:18)

“The scary news is, you’re on your own now, but the cool news is, you’re on your own now.”

(Taylor Swift)

“Sometimes life doesn’t give you what you want, not because you don’t deserve it, but because you deserve so much more.”

PERSEMBAHAN

Untuk Bapak dan Mamak tersayang,

Terima kasih telah menjadi tempat pulang paling hangat dalam setiap perjalanan hidup penulis. Terima kasih karena tidak pernah lelah memberikan doa, dukungan, nasihat, serta kepercayaan yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menghadapi setiap proses selama menempuh pendidikan ini. Ucapan terima kasih dan rasa syukur tidak akan pernah cukup untuk membalas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta umur yang panjang kepada Bapak dan Mamak, sehingga penulis masih diberikan banyak kesempatan untuk membanggakan, membahagiakan, dan mewujudkan segala harapan Bapak dan Mamak.

Untuk adik-adikku tersayang,

Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu memberikan semangat di tengah berbagai proses yang harus dilalui. Semoga Tuhan selalu menjaga langkah kita, memudahkan setiap urusan dan memberikan kesempatan bagi kita untuk terus tumbuh bersama dan saling menguatkan.

Serta Seluruh Pembaca.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih, dan penyertaan-Nya yang senantiasa diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Diplomasi Iklim Maladewa dalam Menghadapi Ancaman Kenaikan Permukaan Laut Pada Tahun 2018-2023”. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak yang senantiasa mendampingi penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas kasih karunia, penyertaan, dan berkat-Nya dalam menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan segala proses perkuliahan serta penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
5. Mba Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala arahan, perhatian, dan motivasi yang diberikan kepada penulis sejak awal masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi;
6. Ibu Dr. Arie Fitria, S.IP., MT., DEA., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang selalu menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, semangat dan motivasi yang sangat baik

kepada penulis, serta dengan sabar mendampingi penulis selama proses penelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan;

7. Bapak Luerdi, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang senantiasa menyediakan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan berbagai masukan dan dukungan yang sangat berharga bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan berbagai saran dan masukan kepada penulis untuk terus mengembangkan kualitas penelitian agar dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lebih baik lagi;
9. Seluruh dosen, staf, dan tenaga pendidik Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, bantuan administrasi, serta dukungan yang berarti bagi penulis, serta memberikan berbagai kesempatan untuk belajar dan berkembang selama menjalani perkuliahan.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Efesus Sinulingga dan Mamak Weninta Anna Br Ginting, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan bagi penulis. Segala usaha, perhatian, motivasi dan kepercayaan yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menempuh pendidikan dan menjalani kehidupan ini. Penulis bersyukur atas setiap doa yang tidak pernah putus dipanjatkan, serta atas segala bentuk dukungan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Semoga segala harapan dan doa yang dipanjatkan oleh Bapak, Mamak, dan penulis dapat terwujud serta senantiasa diberkahi oleh Tuhan;
11. Adik-adik penulis, Claudia Perbina, Carisa Frenindita dan Ersya Elvaretta, yang selalu memberikan kebahagiaan, semangat, doa, dan dukungan bagi penulis, terima kasih atas segala kebersamaan yang penuh sukacita dan menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus berjuang dan berkembang. Semoga setiap impian dan

cita-cita yang kita perjuangkan dapat terwujud dan *no matter where life takes us, i hope we will always remain each other's home*;

12. Sahabat penulis, Septiani Monica dan Vicki Rivaldo, terima kasih telah menunjukkan makna persahabatan yang berarti dalam kehidupan penulis dan menjadi sosok yang selalu memberikan kenyamanan di setiap keadaan. Terima kasih atas ketulusan, doa, serta dukungan yang diberikan, juga atas setiap waktu yang diluangkan untuk berbagi cerita, mendengarkan, dan saling menguatkan dalam berbagai proses kehidupan ini;
13. Emiya Grianisari, sahabat penulis yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat untuk penulis. Terima kasih atas setiap kebersamaan, perhatian dan menjadi tempat untuk saling berbagi cerita dan berkeluh kesah tentang banyak hal selama ini;
14. Anggi Febi Satika, Yesika Angraini dan Rahma Aini, terima kasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga bagi penulis selama menjalani perkuliahan. Terima kasih telah membawa banyak kebahagiaan, pelajaran, dan momen-momen berharga yang membuat setiap proses perkuliahan terasa lebih menyenangkan. Terima kasih atas setiap cerita, canda tawa, kebersamaan, dukungan dan doa yang selalu diberikan, serta atas ruang yang dihadirkan bagi penulis untuk menjadi diri sendiri. *Some people come into our lives unexpectedly and leave footprints in our hearts, and you are those people for me*;
15. Andy Brema Sitompul, Ilham Frayoga, Yosan Efendi, Agus Rismawan dan Muhammad Rangga, terima kasih telah menjadi sahabat baik penulis selama menjalani perkuliahan. Terima kasih atas setiap cerita, canda, tawa, dukungan dan bantuan serta momen-momen yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan;
16. Alaaddin Al-Gerafi, terima kasih karena telah menemani dan membersamai perjalanan penulis. Terima kasih untuk setiap doa,

perhatian serta dukungan yang diberikan kepada penulis. Semoga segala hal baik, kebahagiaan serta impian yang diperjuangkan dapat terwujud;

17. Ester Perbina dan Putri Ibrena, yang telah menjadi sahabat penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas setiap perhatian, doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih atas setiap cerita, kebersamaan, dan momen yang telah kita lalui bersama. Semoga segala hal baik selalu menyertai, *you both deserve all the good things life has to offer*;
18. Desvin Harisda Putri dan Mayza Valencia, yang telah menjadi teman-teman pertama yang menemani perjalanan perkuliahan penulis sejak awal. Terima kasih atas dukungan, bantuan dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Berbagai pengalaman dan kenangan yang telah dilalui bersama menjadi hal yang sangat berharga bagi penulis.
19. Teman-teman KKN Desa Way Gelam 2025, yang telah menjadi rekan selama menjalani masa KKN. Terima kasih atas kerja sama, persahabatan, dan berbagai pengalaman yang memberikan banyak pelajaran serta kenangan yang akan selalu dikenang;
20. Seluruh teman-teman Hubungan Internasional Angkatan 2022, yang telah menemani perjalanan perkuliahan penulis dan menjadi bagian dari berbagai proses, pengalaman, serta kenangan selama menempuh pendidikan di HI Unila;
21. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penulis selama menjalani perkuliahan;
22. Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Ewana Laurensia Br Sinulingga, yang telah berjuang dan bertahan hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tetap melangkah, bahkan pada hari-hari ketika semuanya terasa berat. Setiap proses yang dilalui telah membentuk diri menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih percaya pada rencana Tuhan. Semoga

segala impian yang disimpan dalam doa, harapan serta kehidupan yang selama ini dicita-citakan dapat terwujud pada waktu yang terbaik. *May you always have the courage to grow, the strength to persevere, and the confidence to chase your dreams.*

Bandar Lampung, 18 Juni 2026

Penulis

Ewana Laurensia Br Sinulingga

NPM 2216071147

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Konseptual: <i>Climate Diplomacy</i>	21
2.3 Kerangka Pemikiran	25
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Sumber Data Penelitian	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5 Teknik Analisis Data.....	32
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	34

4.1 HASIL	34
4.1.1 Kondisi Geografis dan Kerentanan Maladewa	34
4.1.2 Fenomena Kenaikan Permukaan Laut di Maladewa	37
4.1.3 Dampak Kenaikan Permukaan Laut terhadap Maladewa.....	39
4.1.4 Kenaikan Permukaan Laut sebagai Ancaman Keamanan Nasional	41
4.1.5 Arah Kebijakan Luar Negeri Maladewa Pada Era Ibrahim Mohamed Solih.....	43
4.2 PEMBAHASAN	46
4.2.1 Bentuk-bentuk Diplomasi Maladewa dalam Menghadapi Ancaman Kenaikan Permukaan Laut.....	46
4.2.2. Analisis Diplomasi Iklim Maladewa Berdasarkan Teori Diplomasi....	80
4.2.3 Ringkasan Telaah Diplomasi Maladewa.....	89
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Persentase Tertinggi dan Terendah Luas Daratan SIDS pada Ketinggian ≤ 5 Meter di Atas Permukaan Laut Tahun 2013.....	3
Tabel 1. 2 Persentase Tertinggi dan Terendah Penduduk SIDS yang Tinggal pada Ketinggian ≤ 5 Meter di Atas Permukaan Laut Tahun 2013	3
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	27
Gambar 4. 1 Perubahan Kondisi Geografis dan Pesisir Maladewa Tahun 1997 dan 2020.....	35
Gambar 4. 2 Penyampaian Pidato Presiden Maladewa, Ibrahim Solih pada COP26 Glasgow, Scotland.....	68
Gambar 4. 3 Penyampaian Pidato Presiden Maladewa, Ibrahim Mohamed Solih pada UNGA Ke-74.....	71

DAFTAR SINGKATAN

AOSIS	: <i>Alliance of Small Island States</i>
COP	: <i>Conference of the Parties</i>
GISS	: <i>Goddard Institute for Space Studies</i>
GMCP	: <i>Greater Malé Connectivity Project</i>
HADR	: <i>Humanitarian Assistance and Disaster Relief</i>
IPCC	: <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
ICT	: <i>Information and Communication Technology</i>
JICA	: <i>Japan International Cooperation Agency</i>
JPMC	: <i>Joint Project Monitoring Committee</i>
LoC	: <i>Line of Credit</i>
NDC	: <i>Nationally Determined Contributions</i>
OCPP	: <i>Ocean Country Partnership Programme</i>
SIDS	: <i>Small Island Developing States</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
UNFCCC	: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UNGA	: <i>United Nations General Assembly</i>
ZEE	: <i>Zona Ekonomi Eksklusif</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim adalah salah satu isu global yang serius di era abad ke-21. Fenomena ini disebabkan oleh perubahan jangka panjang dalam sistem iklim bumi, seperti kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, serta peningkatan frekuensi dan kekuatan cuaca ekstrim (Behera, 2024). Selaras dengan laporan dari NASA *Goddard Institute for Space Studies* (GISS), data observasi menunjukkan bahwa rata-rata suhu global sepuluh tahun terakhir mencapai tingkat tertinggi sejak pengukuran dimulai pada tahun 1880, dan tahun 2023 tercatat sebagai tahun paling panas dalam sejarah modern. Tren kenaikan suhu bumi dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa bumi sedang memasuki fase pemanasan yang sangat berat, bahkan dalam sejarah iklim modern (NASA, 2024). Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) tahun 2022 menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim melibatkan berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pemanasan global telah menjadi ancaman besar terhadap ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, serta berisiko mengganggu kesehatan masyarakat, sekaligus memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Dampak perubahan iklim kini semakin terasa jelas, termasuk pada sistem lautan yang berfungsi sebagai penyerap utama panas berlebih yang ada di atmosfer kita. Ketika konsentrasi gas rumah kaca terus meningkat, sebagian besar panas yang terperangkap di atmosfer tidak hanya memanaskan udara, tetapi juga diserap oleh lautan, sehingga membuat lautan menjadi bagian dari sistem bumi yang paling banyak menyerap energi akibat dampak pemanasan global (Sovacool, 2012). Menurut laporan IPCC (2023), lebih dari sembilan puluh persen dari panas tambahan yang diakibatkan oleh kenaikan gas rumah kaca terperangkap di lautan, sehingga suhu lautan terus naik dan mengganggu keseimbangan energi di bumi. Proses ini menyebabkan terjadinya pemuaiian termal, yaitu kenaikan volume air laut

karena suhu semakin meningkat. Selain itu, melelehnya lapisan es di Greenland, Antarktika, serta gletser di berbagai wilayah pegunungan juga menyebabkan volume air laut meningkat, sehingga memperburuk fenomena kenaikan permukaan laut secara global. Fenomena pemuaiian akibat pemanasan dan mencairnya es secara bersamaan berperan dalam meningkatkan permukaan laut, yang kini menjadi salah satu ancaman utama dari pemanasan global (IPCC, 2022).

Fenomena kenaikan permukaan air laut karena pemanasan global saat ini menjadi ancaman yang sangat serius, terutama bagi daerah pesisir dan negara-negara kepulauan dengan ketinggian rendah di berbagai belahan dunia. Berdasarkan pengamatan dari satelit dan pengukuran langsung, tinggi permukaan laut secara global meningkat sekitar 0,20 meter dengan ketidakpastian $\pm 0,05$ meter selama periode 1901 hingga 2018 (IPCC, 2023). Lebih mengkhawatirkan lagi, peningkatan tersebut semakin cepat dalam beberapa dekade terakhir. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2006 hingga 2018, permukaan laut naik dengan kecepatan rata-rata 3,7 milimeter setiap tahun, yang jauh lebih cepat dibandingkan rata-rata peningkatan permukaan laut pada abad ke-20 yang hanya sekitar 1,3 milimeter per tahun (IPCC, 2023). Ini menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut merupakan tren yang terus berlangsung, yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan pemanasan global yang terus-menerus terjadi.

Beberapa prediksi ilmiah menyebutkan bahwa jika tidak ada upaya nyata untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, kenaikan tinggi air laut global akan terus terjadi dengan kecepatan yang semakin tinggi dan memiliki dampak yang luas serta menyeluruh. Permukaan air laut global diprediksi akan naik antara 0,3 meter hingga 1,1 meter pada akhir abad ke-21, tergantung pada jumlah emisi yang dihasilkan di masa mendatang. IPCC mengatakan bahwa pencairan es di Greenland dan Antarktika yang semakin cepat dapat menyebabkan kenaikan tinggi air laut hingga lebih dari dua meter (IPCC, 2022). Kenaikan ini berpotensi mengancam stabilitas negara-negara kepulauan di wilayah pesisir, seperti hilangnya daratan, meningkatnya risiko banjir dan erosi, serta mengakibatkan masuknya air asin ke sumber air tawar. Hal ini juga dapat mengganggu sistem pertanian dan menekan ketahanan ekosistem pesisir, serta mengurangi sumber pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.

Negara-negara yang tergolong dalam *Small Island Developing States* (SIDS) merupakan kelompok yang paling mudah terkena dampak dari kenaikan permukaan laut. Negara-negara SIDS memiliki ciri khas berupa daratan yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan ketinggian rendah, sehingga sebagian besar wilayahnya berada di dataran pesisir yang rentan terhadap banjir rob, erosi pantai, dan masuknya air asin. Menurut UN-OHRLLS (2020), secara rata-rata wilayah daratan dan populasi negara-negara SIDS berada di bawah ketinggian lima meter dari permukaan laut, dengan beberapa negara seperti Maladewa, Tuvalu, Kiribati, dan Kepulauan Marshall mencapai 95 hingga 100 persen. Karena hampir seluruh pusat kota, pelabuhan, bandara, dan aktivitas ekonomi terletak di daerah pesisir, lebih dari 70 persen aset dan infrastruktur SIDS berada di wilayah pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut. Selain itu, ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata, perikanan, dan jasa berbasis laut membuat SIDS rentan mengalami kerusakan ekonomi jika perubahan iklim terus berlangsung tanpa adanya upaya mitigasi dan adaptasi yang cukup (GCA, 2024).

Tabel 1. 1 Persentase Luas Daratan SIDS pada Ketinggian \leq 5 Meter di Atas Permukaan Laut Tahun 2013

Negara	Persentase Wilayah Daratan yang Terletak pada Elevasi Tidak Lebih dari 5 Meter di Atas Permukaan Laut
Negara Persentase Tertinggi	
Maldives, Tuvalu	100%
Marshall Islands	99%
Kiribati	96%
Cook Islands	88%
Negara Persentase Terendah	
Haiti	4%
Suriname, Timor Leste, Guyana	3%
Papua New Guinea	2%

Sumber: UN-OHRLLS, 2020

Tabel 1. 2 Persentase Penduduk SIDS yang Tinggal pada Ketinggian \leq 5 Meter di Atas Permukaan Laut Tahun 2013

Negara	Persentase Populasi yang Bermukim di Kawasan dengan Elevasi Tidak Lebih dari 5 Meter di Atas Permukaan Laut
Negara Persentase Tertinggi	
Maldives, Tuvalu	100%
Marshall Islands	99%

Kiribati	95%
Suriname	68%
Negara Persentase Terendah	
Mauritius	6%
Haiti	5%
Timor Leste	4%
Dominican Republic	3%
Papua New Guinea	2%

Sumber: UN-OHRLLS, 2020

Di antara negara-negara yang tergolong dalam SIDS, Maladewa merupakan salah satu negara yang sangat rentan terhadap dampak kenaikan permukaan laut. Negara ini terdiri dari 1.192 pulau kecil yang tersebar dalam 26 atol di Samudra Hindia. Maladewa merupakan negara dengan elevasi paling rendah di dunia dengan luas daratan hanya 298 kilometer persegi dan ketinggian rata-rata tanah hanya sekitar 1,5 meter di atas permukaan laut (Floyd et al., 2024). Dengan karakteristik geografis tersebut, Maladewa berada pada tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap dampak kenaikan permukaan laut yang dapat mengancam wilayah daratan, permukiman penduduk dan keberlangsungan negara ini sendiri. Kondisi ini menjadikan perubahan iklim sebagai salah satu tantangan terbesar bagi Maladewa. Presiden Ibrahim Mohamed Solih dalam pidatonya pada *Conference of the Parties* (COP26) menegaskan urgensi ancaman tersebut dengan menyatakan: *"I am here to tell you that my people are already living the steady onset of this reality. Our islands are slowly being inundated by the sea, one by one. If we do not reverse this trend, the Maldives will cease to exist by the end of this century"* (The President's Office Republic of Maldives, 2021). Presiden Ibrahim Mohamed Solih menegaskan bahwa pulau-pulau di Maladewa perlahan terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan laut dan apabila tren ini terus berlanjut, keberadaan Maladewa sebagai sebuah negara dapat terancam di masa depan. Elevasi daratan yang sangat rendah membuat wilayah negara ini sangat mudah mengalami genangan, abrasi pantai, dan intrusi air laut. Brown et al. (2020) menemukan bahwa di pulau buatan Hulhumalé, prediksi kenaikan permukaan laut sebesar 0,6 meter bisa menyebabkan limpasan air laut ke daratan, terutama saat terjadi gelombang panas yang ekstrem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut yang relatif kecil

juga bisa menyebabkan banjir, terutama di daerah yang penduduknya padat seperti Malé, yang menjadi pusat pemerintahan dan infrastruktur utama negara.

Kerentanan Maladewa terhadap kenaikan permukaan laut semakin diperburuk oleh berbagai dampak lingkungan lainnya. Terumbu karang yang selama ini berfungsi sebagai pelindung alami bagi pulau-pulau dari dampak gelombang dan badai kini mengalami fenomena pemutihan (*coral bleaching*) yang disebabkan oleh kenaikan suhu air laut. Pemutihan karang mengancam keseimbangan ekosistem laut dan juga berdampak langsung terhadap sektor pariwisata, yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian Maladewa dengan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut (World Bank, 2022). Pulau-pulau kecil semakin rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama bagi pulau-pulau yang dihuni oleh komunitas dengan sumber daya terbatas, karena hilangnya terumbu karang serta meningkatnya erosi pantai (Ali & Jaleel, 2024). Selain itu, intrusi air asin juga menjadi ancaman serius bagi ketersediaan air bersih di negara ini. Maladewa mengandalkan akuifer dangkal dan sistem desalinasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Sebagian dari pulau-pulau Maladewa mengalami masuknya air asin yang merusak sumber air tawar, sehingga pemerintah terpaksa bergantung pada bantuan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan air warga (World Bank Group, 2021). Hal itu memberi tekanan tambahan terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga.

Ancaman yang dipicu oleh perubahan iklim bagi Maladewa terasa semakin jelas dan muncul dalam beberapa hal yang saling berkaitan, seperti hilangnya daratan hingga dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang mengancam keberlangsungan negara. Masalah ini menjadi ancaman langsung terhadap kedaulatan dan keberadaan negara, yang dalam kajian *security studies* termasuk dalam ancaman eksistensial (*existential threat*), yaitu kondisi ketika suatu fenomena berpotensi menghapus keberadaan sebuah negara secara fisik atau menghilangkan legitimasi politiknya (Buzan et al., 1998). Salah satu dampaknya adalah potensi hilangnya batas-batas maritim yang merupakan dasar hak kedaulatan negara menurut kerangka hukum *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), dimana batas maritim ditetapkan dari keberadaan pulau yang dapat dihuni dan memiliki garis pantai yang stabil dan jika pulau-pulau tersebut tenggelam atau tak

lagi layak huni, maka dasar hukum penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dapat hilang (Rayfuse, 2010). Adapun bagi Maladewa, kehilangan ZEE berarti kehilangan sumber daya ekonomi vitalnya seperti sektor perikanan dan peluang eksplorasi sumber daya alam laut, sehingga masalah ini juga mengancam fondasi ekonomi dan kedaulatan negaranya. Kondisi ini menjadi lebih kompleks karena Maladewa bukan merupakan penyumbang utama krisis iklim yang sedang mereka hadapi. Negara-negara kepulauan kecil seperti Maladewa hanya menimbulkan kurang dari 1 persen emisi gas rumah kaca global. Sebaliknya, negara-negara dengan perekonomian besar adalah kontributor terbesar terhadap emisi global. Global Carbon Project (2020) menyatakan bahwa sepuluh negara dengan ekonomi terbesar di dunia bertanggung jawab atas lebih dari 70 persen emisi gas karbon dioksida secara global. Ketimpangan ini menciptakan kondisi yang disebut sebagai keadilan iklim (*climate injustice*), di mana negara-negara yang kontribusinya terhadap penyebab perubahan iklim tergolong kecil justru menghadapi dampak yang paling berat. Kondisi ketidakadilan ini memperkuat kebutuhan Maladewa untuk mengajukan kepentingannya secara global dan memastikan suara negara kecil tidak terabaikan dalam dinamika politik iklim internasional.

Dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut ini, diplomasi menjadi salah satu solusi dan peran utama sebagai instrumen yang memungkinkan Maladewa dalam memperjuangkan hak dan keberlanjutan negaranya. Keterbatasan kapasitas domestik, baik dari sisi ekonomi, teknologi dan sumber daya manusia, membuat Maladewa tidak mampu menangani isu ini secara mandiri. Dengan diplomasi, Maladewa dapat menekankan kegentingan ancaman kenaikan permukaan laut, memperkuat posisi negara dalam sistem iklim internasional, serta berjuang untuk keadilan iklim bagi negara-negara yang rentan. Dalam konteks ini, diplomasi iklim berfungsi sebagai strategi politik luar negeri sekaligus menjadi bagian dari *survival strategy* bagi Maladewa. Upaya diplomasi iklim Maladewa sendiri telah dilakukan jauh sebelum periode penelitian. Salah satu peristiwa yang paling terlihat ialah ketika Presiden Mohamed Nasheed menggelar rapat kabinet di bawah laut yang terjadi pada tahun 2009 lalu. Tindakan simbolis ini menarik perhatian dunia internasional terhadap isu kenaikan permukaan laut yang dapat menimbulkan ancaman tenggelamnya suatu wilayah atau negara (*NBC News*,

2009). Tindakan ini kemudian menjadi salah satu bentuk perwujudan usaha negara-negara kepulauan kecil dalam memperjuangkan kerentanan dan kepentingan mereka di tengah sistem global yang cenderung didominasi oleh negara-negara besar. Pada periode penelitian (2018-2023), Pemerintahan Maladewa di bawah kepemimpinan Ibrahim Mohamed Solih memperkuat komitmen untuk menjadikan isu perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut, sebagai agenda prioritas dalam politik nasional dan kebijakan luar negerinya. Maladewa secara aktif mengadvokasi agar kenaikan suhu global dibatasi hingga 1,5 °C sesuai dengan *Paris Agreement* serta menyuarakan ancaman kenaikan permukaan laut dalam berbagai forum internasional dan menyatakan perlunya respons global yang lebih serius. Selain mengupayakan pengurangan emisi global, Maladewa juga memacu mekanisme pendanaan iklim yang lebih adil, termasuk pemenuhan komitmen negara maju terhadap pendanaan iklim sebesar USD 100 miliar per tahun seperti yang disepakati dalam *Paris Agreement*.

Maladewa dalam berbagai forum internasional seperti COP, UNGA, dan AOSIS secara konsisten menyuarakan ancaman eksistensialnya yang diakibatkan karena kenaikan muka air laut dan mendorong komunitas global dalam pemenuhan komitmen pendanaan iklimnya serta mengingatkan pengurangan emisi kolektif. Namun, perjuangan diplomatik seperti ini tidaklah mudah. Realitas politik internasional menunjukkan bahwa negosiasi seringkali dikuasai oleh kepentingan negara-negara besar, perbedaan agenda pembangunan, serta lambatnya pemenuhan komitmen yang dijanjikan oleh negara-negara maju. Kondisi ini justru semakin mempersulit posisi Maladewa sebagai sebuah negara kecil. Sementara itu, Maladewa juga harus dengan cermat menjaga keseimbangan antara upaya mempertahankan hak-haknya dan keberlanjutannya, sekaligus mempertahankan hubungan yang baik dengan mitra internasional yang menjadi sumber pendanaan, dukungan teknis, dan kemampuan adaptif yang penting. Tantangan-tantangan tersebut menciptakan dinamika dalam diplomasi iklim Maladewa dan memberikan dasar penting untuk memahami bagaimana upaya negara tersebut dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut.

Oleh karena itu, penelitian tentang diplomasi Maladewa dalam isu ancaman kenaikan permukaan laut menjadi penting untuk menjawab pertanyaan

bagaimanakah strategi diplomasi iklim yang dilakukan Maladewa dalam menghadapi kenaikan permukaan laut pada periode tersebut. Namun, penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada isu adaptasi, dampak sosial-ekonomi, serta aspek hukum internasional, tanpa secara khusus menjelaskan bagaimana diplomasi iklim dijalankan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri dalam suatu masa pemerintahan tertentu. Meski demikian, masa kepemimpinan Ibrahim Mohamed Solih (2018-2023) menunjukkan peningkatan kembali dalam diplomasi iklim serta partisipasi aktif Maladewa di berbagai forum internasional. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada periode 2018 hingga 2023, dengan tujuan menganalisis secara lebih spesifik dan kontekstual bagaimana diplomasi iklim digunakan sebagai alat utama oleh Maladewa dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara akademis dalam pengembangan studi tentang keamanan non-tradisional dan diplomasi iklim, khususnya dengan menghadirkan perspektif dari negara kepulauan kecil (*Small Island Developing States*) seperti Maladewa, yang sering kali terabaikan dalam diskusi keamanan global.

1.2 Rumusan Masalah

Isu kenaikan permukaan laut menjadi ancaman besar bagi Maladewa, sebuah negara kepulauan dengan elevasi yang rendah, yang sangat bergantung pada kestabilan daerah pesisir dan ekosistem lautnya. Dampak perubahan iklim yang mereka alami bukan hanya berupa hilangnya wilayah daratan, tetapi juga mengganggu kedaulatan mereka, identitas kelompok, serta masa depan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Dengan kapasitas domestik yang terbatas, Maladewa tidak punya pilihan lain selain mengandalkan diplomasi sebagai alat utama untuk mendapatkan dukungan dari negara lain dan memperjuangkan kepentingannya. Di berbagai forum internasional seperti COP, AOSIS, dan sidang Majelis Umum PBB, Maladewa terus menyuarakan ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan laut dan mendorong negara-negara maju untuk memenuhi janji pendanaan iklim serta mempercepat upaya pengurangan emisi. Meski begitu, proses negosiasi tersebut tidak selalu berjalan lancar. Berbagai kepentingan politik negara-negara besar, perbedaan prioritas dalam pembangunan, serta kemunduran

dalam mewujudkan komitmen global sering kali menjadi hambatan. Di sisi lain, Maladewa juga harus mempertahankan hubungan yang baik dengan negara-negara mitra yang menjadi sumber bantuan serta dukungan teknis. Hal inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan utama penelitian ini yang berfokus pada **“Bagaimana diplomasi iklim yang dilakukan Maladewa dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut selama periode 2018-2023?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan fenomena kenaikan permukaan laut yang terjadi di Maladewa.
2. Mendeskripsikan diplomasi iklim yang dijalankan Maladewa dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut selama periode 2018-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan studi ilmu Hubungan Internasional, terutama dalam studi diplomasi iklim dan isu keamanan non-tradisional, dengan mengangkat perspektif dari negara kepulauan kecil, yaitu Maladewa, yang selama ini belum cukup banyak mendapatkan perhatian dalam kajian akademik. Dengan menempatkan Maladewa sebagai studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman teoritis tentang cara negara-negara kecil menggunakan diplomasi untuk menjaga keberlangsungan negaranya di tengah ancaman perubahan iklim yang terus meningkat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah, lembaga internasional, maupun SIDS lainnya dalam merumuskan strategi

diplomasi yang lebih efektif untuk menghadapi ancaman perubahan iklim. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu berbagai pemangku kepentingan memahami praktik yang dapat diterapkan dalam merancang kebijakan, program advokasi, maupun kerja sama internasional yang mendukung ketahanan negara-negara rentan di masa depan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pemahaman tentang diplomasi iklim Maladewa berangkat dari kondisi geografis negara ini yang sangat rentan sebagai salah satu negara kepulauan kecil yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Ketinggian daratan yang hanya beberapa meter di atas permukaan laut memicu ancaman langsung terhadap keberlanjutan negara, kedaulatan wilayah dan kehidupan masyarakatnya. Situasi inilah yang mendorong Maladewa untuk menjadikan isu iklim sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan luar negerinya. Beberapa penelitian terdahulu berikut telah menjelaskan bagaimana dan mengapa Maladewa melakukan strategi diplomasi iklim yang aktif. Penelitian-penelitian ini memberikan kerangka konseptual teoretis dan empiris utama untuk menjelaskan pola diplomasi iklim di Maladewa.

Penelitian pertama yang menjadi rujukan adalah karya Kelsey Garrett (2023) yang berjudul *"The Adaptive Capacity to Implement Climate Migration Policy in Response to Sea-Level Rise in the Maldives"*. Penelitian ini membahas perubahan iklim dalam konteks fenomena perubahan kenaikan permukaan laut, dengan menjelaskan rezim kebijakan nasional dan kapasitas Maladewa dalam memandang ancaman eksistensialnya. Dengan menggunakan metode kualitatif (melalui analisis dokumen materi kebijakan, laporan internasional/PBB, dan *Adaptation Policy Framework*), Garrett meneliti sejauh mana pemerintah Maladewa melakukan perancangan dan penerapan proaktif kebijakan adaptasi, termasuk kebijakan iklim. Temuan utama menunjukkan bahwa, secara kelembagaan, Maladewa memiliki kapasitas adaptif yang cukup memadai dibandingkan banyak SIDS lainnya, terutama mengingat negara tersebut telah membangun kerja sama dengan institusi internasional seperti UNDP, IOM, dan UNFCCC. Namun demikian, Garrett juga menemukan bahwa wacana politik mengenai migrasi iklim masih merupakan isu yang sensitif dan belum sepenuhnya

dilembagakan karena unsur kedaulatan dan identitas nasional. Karya ini mendukung argumen bahwa, dalam diplomasi iklimnya, Maladewa berupaya mendapatkan pendanaan untuk adaptasi sekaligus membangun legitimasi atas kemungkinan relokasi dan perlindungan lintas negara bagi masyarakat Maladewa. Dalam penelitian ini, Garrett membantu mengilustrasikan dan menjelaskan hubungan antara kebijakan domestik Maladewa dan dampaknya terhadap diplomasi internasional dalam merespons ancaman kenaikan permukaan laut (Garrett, 2023).

Penelitian kedua dilakukan oleh Akiko Sakamoto dkk. (2022) yang berjudul *“Mitigating Impacts of Climate Change Induced Sea Level Rise by Infrastructure Development: Case of the Maldives”*, yang menjelaskan bagaimana Maladewa menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut melalui pembangunan infrastruktur adaptif dan strategi ketahanan nasional. Penelitian ini menekankan bahwa posisi geografis Maladewa sebagai negara kepulauan rendah menjadikannya sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama banjir pesisir, erosi pantai, dan potensi tenggelamnya wilayah daratan. Dalam penelitian ini, pembangunan infrastruktur seperti reklamasi pulau Hulhumalé dipandang bukan hanya sebagai proyek pembangunan fisik, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk mempertahankan keberlangsungan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman perubahan iklim. Sakamoto menunjukkan bahwa pemerintah Maladewa secara aktif mengembangkan kebijakan adaptasi berbasis pembangunan berkelanjutan dengan dukungan kerja sama internasional dan investasi asing untuk memperkuat ketahanan wilayahnya. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa ancaman perubahan iklim telah mendorong Maladewa untuk mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan nasional dan hubungan internasionalnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak hanya memengaruhi aspek lingkungan domestik, tetapi juga memengaruhi arah kebijakan luar negeri dan kerja sama internasional Maladewa. Namun, studi ini lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur dan strategi adaptasi fisik terhadap ancaman kenaikan permukaan laut (Sakamoto et al., 2022).

Penelitian ketiga merupakan studi yang dilakukan oleh Mohamed Hussain Ali dan Mohamed Jaleel (2024) yang berjudul *“Socioeconomic Ramifications of Sea Level Rise in the Maldives”*. Penelitian ini menemukan bahwa isu kenaikan

permukaan laut telah mengancam infrastruktur pesisir, sektor pariwisata, perikanan, dan ketersediaan air bersih di Maladewa, serta meningkatkan risiko pengungsian internal Maladewa. Dengan menunjukkan betapa luas dan seriusnya dampak ini, studi tersebut secara tidak langsung menjelaskan mengapa Maladewa terdorong untuk menjadikan isu iklim sebagai inti kebijakan luar negerinya. Dalam diplomasi internasional, Maladewa tidak berbicara dari posisi abstrak, tetapi dari realitas konkret kehancuran ekonomi dan sosial yang sedang berlangsung. Hasil temuan Ali dan Jaleel menjelaskan bahwa sektor pariwisata dan perikanan yang merupakan dua tulang punggung ekonomi Maladewa sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut. Dimana hal ini memperkuat argumen bahwa diplomasi iklim juga merupakan bentuk perlindungan kepentingan nasional. Selama masa kepemimpinan Solih, data tersebut menjadi dasar yang kuat bagi Maladewa untuk meminta dukungan internasional yang lebih besar melalui mekanisme seperti *Loss and Damage Fund* serta pendanaan adaptasi (Ali & Jaleel, 2024).

Penelitian keempat adalah karya yang dilakukan oleh Stefano Malatesta dan Marcella Schmidt di Friedberg (2017) yang berjudul "*Environmental Policy and Climate Change Vulnerability in the Maldives: from the "Lexicon of Risk" to Social Response to Change*". Temuan ini memberikan perspektif yang tentang bagaimana kerentanan iklim di Maladewa dikonstruksi secara sosial dan politik. Malatesta dan Friedberg menemukan bahwa Maladewa secara aktif membangun apa yang mereka sebut sebagai *lexicon of risk*, yaitu bahasa, simbol, dan narasi yang menggambarkan negara ini sebagai korban nyata dari perubahan iklim global. Narasi ini tidak hanya digunakan untuk membentuk kesadaran domestik, tetapi juga untuk memengaruhi persepsi internasional. Dengan cara ini, diplomasi iklim Maladewa dilakukan berbasis data ilmiah serta berbasis politik identitas dan emosi kolektif. Penelitian ini relevan dengan periode penelitian, ketika pemerintahan Solih secara intensif menghidupkan kembali citra Maladewa sebagai "negara yang tenggelam" di berbagai forum internasional. Hasil temuan Malatesta dan Friedberg membantu dalam menjelaskan bagaimana diplomasi iklim Maladewa bekerja pada level diskursif ketika Maladewa tidak hanya meminta bantuan, tetapi sekaligus membangun narasi global bahwa kegagalan dunia dalam mengendalikan perubahan

iklim berarti juga kegagalan moral terhadap negara-negara paling rentan yang harus menghadapi akibatnya (Malatesta & Friedberg, 2017).

Penelitian kelima yang menjadi rujukan penulis adalah karya dari Hananto, et al. (2022) yang berjudul "*The Implication of Sea-level Rise Toward the Small Island Nation of Maldives: Legal Perspective*". Penelitian ini membahas dampak dari kenaikan permukaan laut terhadap negara-negara kepulauan kecil, seperti Maladewa, dari perspektif hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap berbagai instrumen hukum internasional, terutama *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), untuk memahami bagaimana hukum internasional memperhatikan dampak perubahan iklim terhadap wilayah negara-negara kepulauan kecil. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut dapat menyebabkan berbagai dampak serius bagi Maladewa, seperti terjadinya keterjangan pulau-pulau kecil, perubahan garis batas laut, hingga kemungkinan terjadinya pemindahan penduduk akibat perubahan iklim. Dengan kondisi geografis yang terbatas, Maladewa menjadi salah satu negara yang paling mudah terkena ancaman tersebut. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa UNCLOS belum secara jelas menyebutkan isu kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim, sehingga perlindungan hukum bagi negara-negara kepulauan kecil masih terbatas. Penelitian ini menekankan peran penting pemerintah Maladewa dan komunitas internasional dalam meningkatkan kerjasama, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta menerapkan solusi adaptasi seperti menjaga ekosistem laut dan membangun pulau-pulau buatan agar wilayah Maladewa tetap dapat bertahan (Hananto et al., 2022).

Penelitian keenam dilakukan oleh Isthiqosah Shalsa Naqiyyah (2025) yang berjudul "*Asia Selatan dalam Pusaran Krisis Iklim: Implikasi Kenaikan Air Laut terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Bangladesh dan Maladewa*". Naqiyyah dalam penelitiannya menganalisis dampak kenaikan permukaan laut yang merupakan bagian dari krisis perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat di wilayah Asia Selatan, khususnya di Bangladesh dan Maladewa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, laporan, dan

dokumen yang berkaitan dengan perubahan iklim. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat di kedua negara tersebut. Di Bangladesh, naiknya permukaan air laut meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir, masuknya air laut yang merusak tanah pertanian dan sumber air bersih, serta mendorong sebagian penduduk untuk pindah dari daerah pesisir. Sementara itu, Maladewa menghadapi ancaman yang lebih eksistensial karena sebagian besar wilayahnya berada sangat rendah dari permukaan laut, sehingga berisiko mengalami tenggelamnya pulau-pulau kecil (Naqiyyah, 2025).

Penelitian ketujuh adalah karya yang dilakukan oleh Melpayanty Sinaga dan Yusril (2021) dengan judul “*Dampak Perubahan Iklim di Pasifik Selatan: Ancaman Naiknya Permukaan Air Laut Terhadap Eksistensi Negara dan Penduduk Kiribati*”. Dalam penelitian ini, Sinaga dan Yusril (2021) menjelaskan mengenai kenaikan permukaan laut yang menjadi ancaman bagi negara-negara kepulauan kecil di wilayah Pasifik Selatan, khususnya fokus pada Kiribati. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka, yaitu melalui pengumpulan berbagai literatur, laporan, dan data yang terkait dengan perubahan iklim serta dampaknya terhadap negara-negara kepulauan. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi Kiribati, seperti terjadinya banjir, masuknya air laut ke dalam sumber air tawar yang mengurangi ketersediaannya, serta ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil yang bisa memengaruhi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Kondisi geografis Kiribati yang berada di atas permukaan laut yang sangat rendah membuat negara ini menjadi salah satu wilayah yang paling rentan menghadapi dampak perubahan iklim. Untuk mengatasi ancaman tersebut, pemerintah Kiribati berusaha menerapkan berbagai upaya seperti strategi adaptasi, mitigasi, serta mempertimbangkan relokasi penduduk sebagai opsi terakhir jika kondisi lingkungan terus memburuk (Sinaga & Yusril, 2021).

Penelitian kedelapan yang menjadi rujukan adalah karya dengan judul “*Tuvalu’s Foreign Policy Strategy: Confronting Climate Crisis and the Country’s Existential Threat*” oleh Aninda Nuraygy Hajjisa dan Charisya (2025). Artikel ini menjelaskan bagaimana Tuvalu, sebuah negara kepulauan kecil, menghadapi

berbagai ancaman akibat perubahan iklim, terutama kenaikan tingkat air laut yang berpotensi mengganggu kelangsungan hidup negara tersebut. Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dengan cara menganalisis studi kasus dan dokumen kebijakan, serta mengkaji diplomasi iklim di tingkat internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tuvalu menerapkan kebijakan luar negeri dan diplomasi internasional untuk memperjuangkan kepentingannya, khususnya dengan menyoroti kerentanan negara kepulauan kecil melalui forum seperti *Alliance of Small Island States*, serta mendukung komitmen global dalam *Paris Agreement* sebagai upaya mendorong tanggung jawab bersama dalam menghadapi krisis iklim (Hajjisa & Charisya, 2025).

Penelitian kesembilan adalah karya Bayu Wahyudin (2020) berjudul “*Ancaman Kenaikan Muka Air Laut Bagi Negara-Negara di Kepulauan Pasifik*”. Penelitian ini membahas bagaimana kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh pemanasan global menjadi ancaman besar bagi negara-negara kepulauan kecil di wilayah Pasifik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur untuk menjelaskan bahwa dampak perubahan iklim tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup negara dan kehidupan sosial masyarakat, bahkan bisa memicu terjadinya migrasi. Melalui pendekatan *Green Politics*, Wahyudin (2020) menekankan pentingnya kerja sama antar daerah seperti *Pacific Islands Forum* dan *Melanesian Spearhead Group* dalam menghadapi ancaman tersebut secara bersama-sama (Wahyudin, 2020).

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Malaika Mikaelsson, Victoria Wibeck dan Bjorn-Ola Linner (2025) berjudul “*Navigating the Waves of Change: Framing Pacific Small Island Developing States within a Geopolitical and Climate Context*”. Penelitian ini melihat bahwa negara-negara SIDS di Pasifik berada di antara kerentanan perubahan iklim dan tekanan geopolitik global. Meskipun sering dianggap rentan, SIDS sebenarnya juga aktif menggunakan diplomasi dan kerja sama internasional untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Namun, peran tersebut kerap tertutupi oleh dominasi kepentingan negara besar, sehingga diplomasi iklim menjadi strategi penting bagi SIDS untuk memperkuat posisi mereka di tingkat global (Mikaelsson et al., 2025).

Penelitian-penelitian terdahulu menempatkan Maladewa sebagai negara kepulauan kecil yang berada dalam posisi sangat rentan terhadap isu kenaikan permukaan laut. Kesamaan lain yang terlihat pada berbagai penelitian terdahulu tersebut adalah pada penggunaan pendekatannya yang lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian, baik melalui analisis kebijakan, kajian dokumen, maupun pendekatan wacana, untuk menjelaskan bagaimana isu iklim dijadikan sebagai strategi diplomasi luar negeri. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai penelitian-penelitian terdahulu serta memudahkan untuk melihat perbandingannya, berikut disajikan tabel ringkasan penelitian terdahulu dari kelima penelitian tersebut:

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Teori dan Konsep	Metode	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kelsey Garrett dalam "The Adaptive Capacity to Implement Climate Migration Policy in Response to Sea-Level Rise in the Maldives" (2023).	<i>Adaptive Capacity</i> dan <i>Climate Migration Governance</i> .	Kualitatif-Analisis kebijakan dan dokumen.	Menganalisis mengenai kesiapan institusional dan kebijakan Maladewa dalam menghadapi migrasi iklim akibat kenaikan permukaan laut serta implikasinya terhadap orientasi kebijakan luar negeri.	Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Maladewa telah memiliki kerangka kebijakan dan institusi yang relatif matang dalam menghadapi dampak perubahan iklim, implementasi kebijakan migrasi iklim masih terhambat oleh faktor politik, sosial, dan psikologis sehingga pemerintah lebih memilih jalur diplomasi internasional dibandingkan relokasi massal penduduk.
2	Akiko Sakamoto dkk. dalam "Mitigating Impacts of Climate Change Induced Sea	<i>Climate Resilience</i> dan Adaptasi Perubahan Iklim.	Kualitatif-Analisis studi kasus dan Analisis wacana.	Berfokus pada pembangunan infrastruktur digunakan sebagai strategi untuk mengurangi dampak	Studi ini menemukan bahwa pembangunan pulau reklamasi, peninggian wilayah daratan, dan perencanaan tata ruang menjadi langkah penting

	<i>Level Rise by Infrastructure Development: Case of the Maldives</i> ” (2022).			kenaikan permukaan laut terhadap keberlangsungan wilayah dan masyarakat Maladewa.	pemerintah Maladewa dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan strategi adaptasi tersebut sangat dipengaruhi oleh dukungan kerja sama internasional, investasi asing, dan integrasi isu perubahan iklim ke dalam kebijakan pembangunan nasional
3	Mohamed Hussain Ali dan Mohamed Jaleel dalam <i>"Socioeconomic Ramifications of Sea Level Rise in the Maldives"</i> (2024).	<i>Climate Governance and Vulnerability Framework.</i>	Analisis Kualitatif Deskriptif.	Menganalisis dampak kenaikan permukaan laut terhadap sektor sosial dan ekonomi utama Maladewa, khususnya pariwisata, perikanan, dan pemukiman pesisir.	Fenomena kenaikan permukaan laut berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata, perikanan, dan pemukiman pesisir Maladewa, sehingga perubahan iklim dipandang sebagai isu keamanan nasional yang mendorong keaktifan diplomasi iklim di tingkat internasional.
4	Stefano Malatesta dan Marcella Schmidt di Friedberg dalam <i>"Environmental Policy and Climate Change Vulnerability in the Maldives: from the "Lexicon of Risk" to Social Response to Change"</i> (2017).	<i>Climate Vulnerability, Human Security dan Socioeconomic Risk.</i>	Kualitatif-Analisis kebijakan.	Menganalisis mengenai keterkaitan antara kebijakan adaptasi lingkungan domestik Maladewa dengan strategi diplomasi luar negerinya.	Hasil temuan Malatesta & Friedberg menemukan bahwa kebijakan lingkungan domestik Maladewa terintegrasi erat dengan diplomasi luar negeri, di mana upaya adaptasi dan perlindungan pesisir juga dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperoleh dukungan politik dan pendanaan internasional.

5	Hananto, dkk. dalam " <i>The Implication of Sea-level Rise Toward the Small Island Nation of Maldives: Legal Perspective</i> " (2022).	Konsep <i>Sea Level Rise</i> .	Analisis Kualitatif Deskriptif.	Berkfokus pada dampak kenaikan permukaan laut terhadap keberlangsungan negara kepulauan kecil serta tantangan yang dihadapi dalam aspek lingkungan, sosial, dan kebijakan adaptasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut menimbulkan ancaman serius bagi wilayah, penduduk, dan keberlanjutan negara kepulauan kecil sehingga diperlukan strategi adaptasi, kerja sama internasional, dan kebijakan mitigasi perubahan iklim yang lebih kuat.
6	Isthiqosah Shalsa Naqiyyah dalam " <i>Asia Selatan dalam Pusaran Krisis Iklim: Implikasi Kenaikan Air Laut terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Bangladesh dan Maladewa</i> " (2025).	<i>Human Security</i> .	Analisis Kualitatif Deskriptif.	Berkfokus pada analisis implikasi kenaikan permukaan laut terhadap kelangsungan hidup masyarakat di Bangladesh dan Maladewa sebagai negara yang rentan terhadap perubahan iklim.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut berdampak langsung dan luas terhadap kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya risiko banjir, hilangnya tempat tinggal, keterbatasan sumber daya, serta meningkatnya rasa ketakutan dan kerentanan sosial.
7	Melpayanty Sinaga dan Yusril dalam " <i>Dampak Perubahan Iklim di Pasifik Selatan: Ancaman Naiknya Permukaan Air Laut Terhadap Eksistensi Negara dan Penduduk Kiribati</i> " (2021).	Keamanan manusia (<i>human security</i>) dan Sekuritisasi.	Analisis Kualitatif Deskriptif.	Berkfokus pada analisis dampak kenaikan permukaan laut terhadap eksistensi negara dan kehidupan masyarakat Kiribati serta bagaimana pemerintah merespons ancaman tersebut melalui berbagai kebijakan.	Kenaikan air laut menimbulkan ancaman serius seperti banjir, intrusi air laut, dan berkurangnya sumber daya penting yang berdampak pada kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah menerapkan strategi adaptasi, mitigasi, dan relokasi untuk menjaga keberlangsungan negara.

8	Aninda Nuraygy Hajjisa dan Charisya dalam “ <i>Tuvalu’s Foreign Policy Strategy: Confronting Climate Crisis and the Country’s Existential Threat</i> ” (2025).	<i>Constructivism, dan Climate Diplomacy.</i>	Analisis Kualitatif Deskriptif.	Menganalisis strategi kebijakan luar negeri Tuvalu dalam menghadapi ancaman eksistensial perubahan iklim melalui diplomasi di forum internasional, khususnya COP.	Tuvalu berhasil memanfaatkan identitas sebagai negara paling rentan untuk membangun kekuatan diplomasi melalui tekanan moral, diplomasi simbolik, dan koalisi (AOSIS), sehingga berkontribusi pada target 1,5 °C, pembentukan <i>Loss and Damage Fund</i> , dan peningkatan pendanaan iklim global.
9	Bayu Wahyudin dalam “ <i>Ancaman Kenaikan Muka Air Laut Bagi Negara-Negara di Kepulauan Pasifik</i> ” (2020).	<i>Green Politics.</i>	Analisis Kualitatif Deskriptif.	Ancaman kenaikan permukaan laut terhadap negara-negara kepulauan di Pasifik serta upaya kerja sama regional dalam mengatasi dampak tersebut.	Kenaikan permukaan laut berpotensi menghilangkan wilayah negara dan memicu masalah sosial seperti pengungsi iklim, sehingga diperlukan kerja sama regional dan internasional meskipun masih menghadapi kendala akibat perbedaan kepentingan antarnegara.
10	Malaika Mikaelsson, Victoria Wibeck dan Bjorn-Ola Linner dalam “ <i>Navigating the Waves of Change: Framing Pacific Small Island Developing States within a Geopolitical and Climate Context</i> ” (2025).	<i>Climate Diplomacy.</i>	Analisis Kualitatif Deskriptif.	Menganalisis implikasi hukum dari kenaikan permukaan laut terhadap negara kepulauan kecil, khususnya Maladewa, serta bagaimana hukum internasional mengatur masalah tersebut.	Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut menimbulkan tantangan hukum bagi negara kepulauan kecil seperti Maladewa karena hukum laut internasional belum secara jelas mengatur dampak perubahan iklim terhadap wilayah negara.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan Maladewa sebagai negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus aktor yang aktif dan strategis dalam diplomasi internasional, dengan kenaikan permukaan laut yang dipahami sebagai ancaman multidimensional terhadap ekonomi, stabilitas sosial, identitas nasional, dan keberlangsungan negara. Namun penelitian-penelitian tersebut masih cenderung membahas strategi diplomasi Maladewa secara umum pada aspek kerentanan dan adaptasi tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan dinamika kebijakan luar negeri dalam satu rezim pemerintahan tertentu. Lebih tepatnya, belum ada yang secara spesifik menganalisis bagaimana diplomasi iklim yang dilakukan oleh Maladewa dalam menghadapi ancaman eksistensial akibat dari isu kenaikan permukaan laut, sehingga penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memusatkan analisis pada periode pemerintahan Ibrahim Mohamed Solih (2018-2023) untuk menunjukkan secara lebih kontekstual bagaimana diplomasi iklim dilakukan sebagai instrumen utama kebijakan luar negeri Maladewa dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut.

2.2 Landasan Konseptual: *Climate Diplomacy*

Dalam kajian hubungan internasional, diplomasi menjadi alat utama yang digunakan oleh negara-negara untuk berkomunikasi dan memengaruhi kondisi di tingkat internasional. Menurut Holmes dan Rofe (2016) dalam bukunya yang berjudul "*Global Diplomacy: Theories, Types, and Models*", diplomasi diartikan sebagai sebuah praktik sosial dan politik yang berfungsi untuk mengatur serta mengelola hubungan antaraktor di dalam sistem internasional melalui proses komunikasi yang terstruktur. Diplomasi mencakup proses pembentukan, pemeliharaan, dan perundingan hubungan antara berbagai pihak, seperti negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara, yang masing-masing memiliki kepentingan, identitas, serta hubungan kekuasaan yang berbeda (Holmes & Rofe, 2016). Dalam kerangka pemikiran tersebut, Holmes dan Rofe (2016) menekankan tiga fungsi utama dari diplomasi, yaitu komunikasi, representasi, dan negosiasi. Komunikasi adalah proses membagikan pesan, gagasan, dan kepentingan antara orang-orang. Representasi membuat diplomat menjadi pihak yang berbicara dan

melakukan tindakan atas nama entitas politik yang mereka wakili. Negosiasi berperan sebagai alat untuk mengatasi perbedaan dan menemukan kesepakatan bersama. Dengan ketiga fungsi tersebut, diplomasi berperan sebagai alat penting dalam meringankan konflik, mendorong kerja sama, serta mengelola ketegangan dalam dunia politik global, termasuk isu-isu yang melibatkan beberapa negara seperti keamanan, perdagangan, dan perubahan iklim.

Dengan munculnya tantangan global yang semakin kompleks, cakupan diplomasi kini telah berkembang jauh lebih luas dari isu-isu tradisional seperti perang. Globalisasi, perkembangan teknologi, serta ancaman lintas batas seperti krisis kesehatan dan perubahan iklim telah memperluas fungsi diplomasi menjadi alat penting dalam mengatasi berbagai isu global (Subiyanto, 2024). Pilihan isu yang masuk dalam agenda diplomasi sangat bergantung pada cara negara memandang ancaman tersebut, tujuan kepentingan nasional yang ingin dicapai, serta kemampuan lembaga-lembaga diplomasi dalam merespons tantangan yang ada di tingkat global. Masalah global yang kini semakin menjadi perhatian dalam diplomasi internasional adalah perubahan iklim. Perubahan iklim adalah fenomena yang memengaruhi seluruh dunia dan secara langsung membahayakan kehidupan, perekonomian, serta kestabilan sosial di berbagai wilayah. Dampak seperti naiknya permukaan laut sangat berdampak bagi negara-negara kepulauan kecil, termasuk Maladewa, yang menghadapi ancaman terhadap keberadaannya. Dalam konteks ini, konsep *climate diplomacy* muncul sebagai bentuk pengembangan dari diplomasi tradisional yang khusus menghadapi perubahan iklim. *Climate diplomacy* merujuk pada upaya dan proses yang dilakukan oleh negara-negara untuk membentuk kerangka kerja internasional, memengaruhi kebijakan global, serta memperjuangkan posisi dan kepentingannya dalam negosiasi yang berkaitan dengan perubahan iklim (Doussis & Dikaivos, 2025). Dengan kata lain, diplomasi iklim adalah cara negara menyusun, mendorong, dan memperjuangkan tujuan iklim nasional serta global dengan menggunakan praktik diplomasi di berbagai forum bilateral maupun multilateral. Dalam penerapannya, diplomasi iklim melibatkan proses negosiasi terkait pengurangan emisi gas rumah kaca, penyusunan target adaptasi berdasarkan *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang telah disepakati dalam *Paris Agreement*, upaya memperjuangkan pendanaan iklim, serta

pembentukan kemitraan antar negara untuk meningkatkan pengaruh dalam forum internasional (Doussis & Dikaios, 2025). Diplomasi iklim juga berkaitan dengan konsep keadilan iklim (*climate justice*), yang menekankan pentingnya tanggung jawab negara-negara industri besar atas dampak perubahan iklim yang lebih besar yang dialami oleh negara-negara berkembang dan rentan.

Bentuk-bentuk Diplomasi:

1. Diplomasi Bilateral

Diplomasi bilateral adalah bentuk praktis utama hubungan diplomatik antarnegara. Dalam diplomasi bilateral, dua negara secara langsung berinteraksi untuk membahas kemitraan yang saling menguntungkan dan merumuskan kerja sama yang bermanfaat bagi kedua pihak (Berridge, 2010). Diplomasi bilateral memberikan fleksibilitas besar dalam merancang agenda negosiasi, karena kedua negara bisa menyesuaikan tujuan dan pendekatan mereka tanpa perlu menunggu kesepakatan bersama dari berbagai pihak seperti yang terjadi dalam forum multilateral. Hubungan bilateral melibatkan diskusi tingkat tinggi, kerja sama teknis, pertukaran budaya, hingga kesepakatan tentang keamanan dan pembangunan. Dalam konteks perubahan iklim dan diplomasi iklim, diplomasi bilateral memungkinkan negara-negara untuk membuat kesepakatan kerja sama yang bersifat teknis atau finansial, seperti bantuan teknologi ramah lingkungan, proyek adaptasi lokal, atau penyusunan strategi daerah untuk menghadapi dampak perubahan iklim (Doussis & Dikaios, 2025). Misalnya, dalam isu iklim, sebuah negara kepulauan kecil bisa menjalin kerja sama dua pihak dengan negara donor agar mendapatkan dana iklim atau bantuan teknologi untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Dengan menggunakan diplomasi bilateral, negara-negara kecil seperti Maladewa dapat membangun hubungan yang sama tingginya dengan berbagai negara maju, sehingga bisa mendapatkan dukungan teknis, kemampuan institusional, serta dana yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

2. Diplomasi Multilateral

Diplomasi multilateral adalah bentuk diplomasi yang melibatkan tiga atau lebih negara dalam forum internasional untuk membahas isu-isu secara bersama (Berridge, 2010). Diplomasi multilateral merupakan arena penting dalam menghadapi isu global seperti perubahan iklim, karena masalah ini harus diselesaikan dengan kerja sama dari seluruh masyarakat internasional. Dalam diplomasi multilateral, negara-negara berkumpul di forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNFCCC untuk menyusun aturan dan kebijakan global yang diterima secara luas oleh banyak pihak. Konsensus yang tercapai dalam forum multilateral menghasilkan keputusan yang memiliki legitimasi yang lebih luas dan dapat mendorong tindakan kolektif yang lebih efektif. Diplomasi multilateral memberikan kesempatan bagi negara-negara kecil untuk memperkuat posisi mereka melalui pembentukan koalisi atau aliansi strategis, seperti *Alliance of Small Island States* (AOSIS). Dengan melakukan diplomasi multilateral, negara-negara yang rentan dapat menyampaikan keluhan mereka dalam kerangka aturan global, mendorong negara-negara maju untuk memiliki ambisi pengurangan emisi yang lebih besar, serta memperoleh akses terhadap mekanisme pendanaan iklim internasional (Berridge, 2010).

Dalam penelitian ini, kerangka *climate diplomacy* digunakan untuk menganalisis cara Maladewa merancang dan menerapkan kebijakan luar negerinya dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut. Penelitian ini memfokuskan pada penggunaan mekanisme diplomasi bilateral dan multilateral. Dalam konteks ini, Maladewa memanfaatkan diplomasi bilateral sebagai sarana untuk membangun kemitraan strategis dengan negara pemberi bantuan, lembaga pembangunan, serta mitra teknologi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dana, dukungan adaptasi, dan transfer teknologi yang diperlukan guna menjaga keberlanjutan wilayah dan masyarakat Maladewa. Pada saat yang sama, diplomasi multilateral digunakan untuk mendorong kepentingan negara-negara kepulauan kecil dalam berbagai forum internasional seperti UNFCCC dan PBB, serta melalui keanggotaan dalam koalisi seperti AOSIS untuk memperkuat kemampuan negosiasi dan memengaruhi kebijakan iklim secara global. Dengan menggabungkan kedua bentuk diplomasi

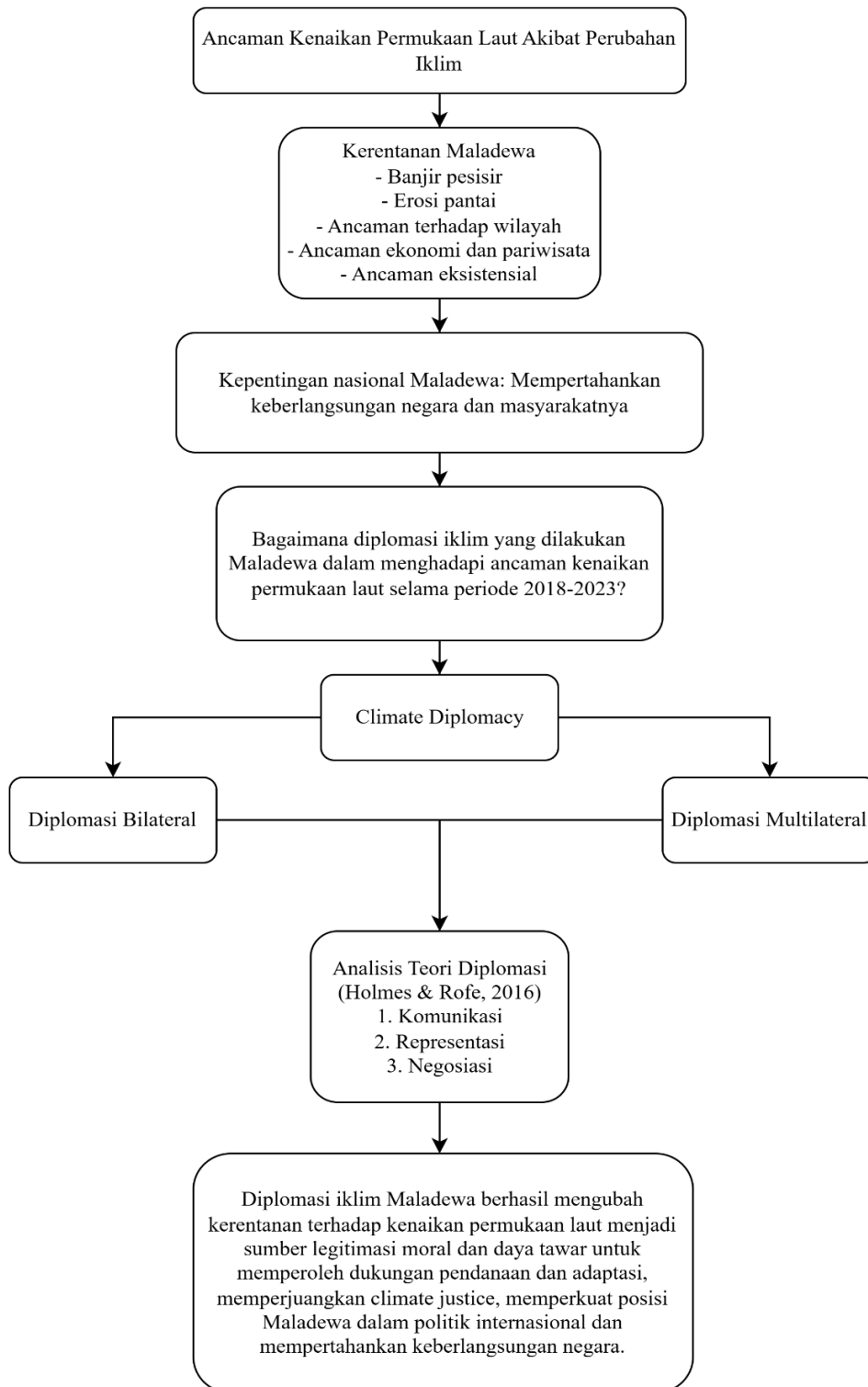
tersebut, Maladewa mencoba menjaga kepentingan nasionalnya sekaligus mendorong para negara besar untuk bersama-sama memikul tanggung jawab dalam menghadapi perubahan iklim. Oleh karena itu, analisis terhadap diplomasi bilateral dan multilateral menjadi penting dalam menganalisis bagaimana *climate diplomacy* Maladewa dijalankan dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun untuk menjelaskan bagaimana Maladewa menggunakan diplomasi sebagai bagian dari kebijakan luar negeri untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan permukaan laut. Penelitian dimulai dari kondisi objektif Maladewa sebagai sebuah negara kepulauan kecil yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, dengan dampak yang mencakup aspek wilayah, populasi, ekonomi, serta kedaulatan negara tersebut. Ancaman ini membentuk pandangan tentang kepentingan nasional yang fokus pada perlindungan keberadaan negara dan kelangsungan ekonomi. Kepentingan tersebut kemudian dibawa ke dalam kebijakan luar negeri, di mana perubahan iklim ditetapkan sebagai prioritas utama, dengan diplomasi menjadi alat utama untuk menyampaikan kepentingan Maladewa. Pendekatan ini menganggap isu perubahan iklim sebagai masalah keamanan dan keberlanjutan, serta berupaya menggalang dukungan dari pihak-pihak internasional.

Penelitian ini menerapkan konsep *climate diplomacy*, yang mencakup diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral. Diplomasi bilateral digunakan untuk menjelaskan hubungan langsung antara Maladewa dengan negara-negara mitra, agar mendapatkan dukungan dalam bentuk teknis, finansial, dan politik, seperti bantuan adaptasi terhadap perubahan iklim, teknologi ramah lingkungan, atau perlindungan diplomatik dalam forum internasional. Sementara itu, konsep diplomasi multilateral digunakan untuk menjelaskan strategi yang dilakukan Maladewa melalui berbagai forum internasional seperti PBB, UNFCCC, serta AOSIS, dengan tujuan membangun legitimasi di tingkat global, memperkuat koalisi strategis, serta mendorong mekanisme pendanaan yang mendukung negara-negara

yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kepemimpinan Ibrahim Mohamed Solih pada periode 2018-2023 menekankan prioritas perubahan iklim, sehingga *climate diplomacy* menjadi terstruktur dan menghubungkan ancaman lingkungan dengan kepentingan nasional serta menghasilkan strategi diplomasi iklim yang bertujuan mempertahankan keberadaan Maladewa serta memperjuangkan keadilan iklim di panggung internasional.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: diolah oleh peneliti

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menekankan pemahaman mendalam yang dibangun oleh individu atau kelompok dengan menggunakan data deskriptif serta proses analisis terhadap fenomena sosial (Creswell, 2014). Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks realitas dalam proses analisis, sehingga memungkinkan peneliti menangkap makna yang terbentuk melalui interaksi sosial, kebijakan, dan praktik diplomasi. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, terutama ketika berfokus pada strategi dan proses pengambilan keputusan negara, yang tidak selalu bisa diukur secara kuantitatif. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan fenomena secara fleksibel, menggali isu dan menyesuaikan pertanyaan penelitian dengan kondisi lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara sistematis bagaimana Maladewa menggunakan diplomasi iklim dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan lautan pada periode 2018-2023. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memetakan konteks geografis, politik, dan sosial-ekonomi Maladewa, termasuk kerentanan negara kepulauan kecil terhadap perubahan iklim dan ancaman eksistensial yang ditimbulkan. Sementara itu, aspek analitis berfokus pada bagaimana konsep *climate diplomacy* digunakan melalui mekanisme diplomasi bilateral dan multilateral, serta bagaimana kepemimpinan Ibrahim Mohamed Solih membentuk prioritas kebijakan luar negeri negara ini. Penelitian ini juga menelaah interaksi antara strategi diplomasi dan respons internasional terhadap isu perubahan iklim, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran Maladewa di arena global. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan narasi yang kaya dan kontekstual, menjelaskan proses, strategi, dan hasil diplomasi iklim Maladewa, sekaligus memberikan wawasan

tentang bagaimana negara kecil dapat memperjuangkan kepentingannya di forum internasional melalui jalur diplomasi yang terstruktur dan terarah. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman yang lebih realistis terhadap diplomasi sebagai strategi kebijakan luar negeri yang kompleks dan multidimensi.

3.2 Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti memusatkan perhatian pada fenomena yang relevan dan mencegah “tersesat dalam volume data yang luas” (Miles et al., 2014). Penelitian ini berfokus pada analisis diplomasi iklim Maladewa dengan menggunakan konsep *climate diplomacy* menurut Doussis & Dikaios (2025) dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut pada periode 2018-2023 di bawah kepemimpinan Ibrahim Mohamed Solih. Periode pemerintahan Solih dipilih sebagai fokus analisis karena kepemimpinannya menandai pergeseran signifikan dari pendekatan pragmatis Abdulla Yameen menuju diplomasi iklim yang lebih normatif dan konsisten dengan menjadikan ancaman kenaikan permukaan laut sebagai isu sentral kebijakan luar negeri Maladewa. Hal ini ditandai oleh meningkatnya keterlibatan dalam forum multilateral, penegasan isu kenaikan permukaan laut sebagai ancaman eksistensial negara, serta upaya aktif untuk memobilisasi dukungan internasional. Meskipun sebagian penelitian terdahulu telah membahas isu adaptasi, kerentanan sosial-ekonomi, dan posisi Maladewa dalam politik iklim global, masih terdapat keterbatasan dalam memahami bagaimana diplomasi iklim dijalankan secara konkret sebagai strategi kebijakan luar negeri dalam satu rezim pemerintahan tertentu. Dengan dasar ini, penelitian diarahkan untuk menjelaskan bagaimana Maladewa menggunakan diplomasi iklim sebagai instrumen kebijakan luar negeri untuk mengamankan dukungan internasional, membangun legitimasi, dan mempengaruhi kebijakan global terkait perubahan iklim. Fokus penelitian ini mencakup identifikasi strategi diplomatik, peran aktor utama, serta interaksi antara kepentingan nasional dan kepentingan global yang tercermin melalui negosiasi dan kerja sama internasional.

Dalam kerangka ini, fokus penelitian akan menggunakan diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral. Diplomasi bilateral menyoroti upaya Maladewa membangun hubungan langsung dengan negara-negara mitra, seperti dalam kerja sama teknis, pendanaan adaptasi iklim, dan bantuan teknologi hijau, untuk memperoleh dukungan yang konkret. Sementara itu, diplomasi multilateral menekankan peran Maladewa dalam forum internasional seperti PBB, UNFCCC, dan AOSIS untuk menginternasionalisasikan ancaman kenaikan permukaan laut, memperjuangkan norma keadilan iklim, serta mendorong kerangka pendanaan global yang lebih adil. Dengan demikian, penelitian ini akan menelusuri bagaimana *climate diplomacy* dijalankan secara strategis melalui kedua jalur diplomasi tersebut, mulai dari perencanaan, negosiasi, hingga implementasi kebijakan luar negeri Maladewa dalam memperkuat posisi negara di panggung global.

3.3 Sumber Data Penelitian

Penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder sebagai bahan utama dalam analisis penelitian ini, meliputi publikasi ilmiah, buku, artikel akademik, dokumen dan arsip dan berita internasional yang kredibel terkait diplomasi iklim Maladewa dan isu kenaikan permukaan laut pada periode 2018-2023. Data ini digunakan untuk memahami dinamika *climate diplomacy* serta jalur diplomasi bilateral dan multilateral yang ditempuh Maladewa. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan dokumen dan pernyataan resmi pemerintah Maladewa sebagai sumber data primer dalam analisis ini, termasuk laporan Kementerian Luar Negeri (<https://www.foreign.gov.mv/index.php/en/>), pidato oleh Presiden Ibrahim Mohamed Solih, *Maldives Meteorological Service* (MMS), siaran pers, dan materi kebijakan yang tersedia di situs resmi (<https://presidency.gov.mv>) untuk menelusuri strategi kebijakan luar negeri negara ini.

Laporan dari organisasi internasional seperti *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), *Alliance of Small Island States* (AOSIS) dan *World Bank* turut digunakan untuk memetakan ancaman kenaikan permukaan laut serta urgensi tindakan diplomatik yang diambil. Berita dan liputan dari media internasional

terpercaya, seperti Reuters, NBC, dan *NASA Science* digunakan untuk memperkuat kronologi peristiwa, respons negara lain, dan langkah-langkah diplomasi yang diambil Maladewa di tingkat global. Dengan kombinasi ini, penelitian ini akan memperoleh sumber data yang berlapis, saling melengkapi, dan memungkinkan analisis mendalam terhadap bagaimana Maladewa merancang dan mengimplementasikan *climate diplomacy* melalui mekanisme diplomasi bilateral maupun diplomasi multilateral yang dijalankan Maladewa selama periode 2018-2023.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi pustaka atau *library research* dengan fokus pada dokumen dan publikasi yang relevan mengenai diplomasi iklim Maladewa. Peneliti akan menelusuri berbagai sumber seperti dokumen resmi Kementerian Luar Negeri Maladewa, laporan kebijakan pemerintah, pernyataan publik, serta pidato resmi yang tersedia secara daring untuk memahami isu dan fenomena secara mendalam (Creswell, 2014). Selain itu, laporan internasional seperti publikasi IPCC, UNFCCC, dan materi dari koalisi negara kepulauan kecil (AOSIS) digunakan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai konteks perubahan iklim dan strategi *climate diplomacy*. Adapun tahap awal yang akan dilakukan adalah dengan menelusuri literatur dan dokumen menggunakan kata kunci seperti *Maldives climate diplomacy*, *bilateral diplomacy*, *multilateral diplomacy*, dan *sea level rise* di berbagai basis data akademik, jurnal internasional, serta publikasi resmi lembaga global. Sumber akademik berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian juga digunakan untuk memperkuat kerangka teoretis, khususnya terkait konsep diplomasi, diplomasi bilateral, dan diplomasi multilateral. Media internasional yang kredibel, seperti Reuters, NBC, dan The Guardian juga dimanfaatkan untuk menyusun fenomena dan ilustrasi tindakan diplomasi Maladewa dari tahun 2018 hingga 2023.

Seluruh data kemudian dianalisis secara sistematis dengan menerapkan triangulasi sumber data, yaitu membandingkan informasi dari dokumen resmi pemerintah, laporan internasional, literatur akademik, dan liputan media. Data

diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian yaitu; ancaman kenaikan permukaan laut, kepentingan nasional Maladewa, jalur diplomasi bilateral dan multilateral, serta capaian dari strategi *climate diplomacy*. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian memperoleh data yang komprehensif, terstruktur, dan saling melengkapi, sehingga memudahkan analisis mendalam mengenai bagaimana Maladewa merancang dan menjalankan kebijakan diplomasi iklim dalam menghadapi risiko eksistensial akibat kenaikan permukaan laut selama periode 2018-2023.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Pendekatan ini dipilih karena menawarkan kerangka yang sistematis untuk mengelola, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data sekunder yang bersifat kompleks, seperti dokumen kebijakan, laporan internasional, dan publikasi akademik terkait diplomasi iklim Maladewa. Model interaktif ini menekankan proses analisis yang bersifat dinamis dan berulang yang dapat membuat peneliti melihat dan menyesuaikan interpretasi data seiring bertambahnya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti (Miles et al., 2014). Tiga komponen utama dalam model ini adalah sebagai berikut:

a. Kondensasi Data

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan proses merangkum, menyaring, dan menyeleksi informasi yang relevan dari seluruh sumber data yang dikumpulkan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menyeleksi dokumen dan laporan yang berfokus pada kebijakan diplomasi Maladewa terkait kenaikan permukaan laut antara tahun 2018 hingga 2023. Data yang diutamakan mencakup langkah-langkah diplomasi bilateral, peran Maladewa dalam forum multilateral seperti UNFCCC dan PBB, serta tindakan *climate diplomacy* yang dijalankan untuk memperjuangkan kepentingan negara. Proses penyaringan ini membantu mengidentifikasi informasi yang paling relevan, misalnya pernyataan resmi pemerintah, dokumen AOSIS, laporan IPCC, dan publikasi akademik yang menjelaskan strategi adaptasi dan mitigasi Maladewa. Dengan cara ini, data

yang terlalu luas atau tidak relevan dapat dieliminasi, sehingga fokus analisis tetap terjaga.

b. Penyajian Data

Tahap ini melibatkan penyajian data dalam bentuk yang terstruktur agar memudahkan pengamatan pola, hubungan, dan tren. Dalam penelitian ini, data disusun berdasarkan kategori analisis seperti: ancaman kenaikan permukaan laut, kepentingan nasional Maladewa, diplomasi bilateral, diplomasi multilateral, serta hasil dari *climate diplomacy*. Tabel, matriks, dan bagan sederhana dapat digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara ancaman lingkungan, kepentingan nasional, dan strategi diplomasi yang diambil. Penyajian visual ini memudahkan peneliti untuk menilai bagaimana langkah-langkah diplomasi saling berkaitan dan mendukung pencapaian tujuan Maladewa di kancah internasional.

c. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Pada tahap terakhir ini, peneliti menafsirkan makna dari data yang telah disusun dalam tahap penyajian data, kemudian menarik kesimpulan yang relevan dengan bukti yang terkumpul. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan selalu dicek kembali melalui verifikasi untuk memastikan ketepatan interpretasi. Tahap ini mencakup upaya mengaitkan temuan empiris dengan konsep diplomasi, *climate diplomacy*, serta diplomasi bilateral dan multilateral untuk menjelaskan bagaimana Maladewa merespons ancaman kenaikan permukaan laut pada periode 2018-2023. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan data dari dokumen resmi pemerintah Maladewa, laporan UNFCCC, publikasi IPCC, dan kajian akademik, sehingga kesimpulan yang diperoleh mencerminkan strategi dan hasil diplomasi iklim yang akurat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa diplomasi iklim yang dijalankan Maladewa pada periode 2018-2023 menjadi instrumen penting dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut yang mengancam keberlangsungan negara. Ancaman perubahan iklim telah menjadi isu yang berkaitan dengan keamanan, pembangunan, dan masa depan negara. Dalam kondisi tersebut, Maladewa memanfaatkan diplomasi sebagai sarana untuk memperoleh dukungan internasional sekaligus memperjuangkan kepentingannya dalam tata kelola iklim global. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan suatu negara dalam politik internasional tidak selalu ditentukan oleh luas wilayah, jumlah penduduk, kapasitas militer, maupun kekuatan ekonominya. Sebagai negara kepulauan kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pengaruh material, Maladewa justru mampu meningkatkan posisinya dalam politik internasional melalui diplomasi. Kerentanan yang dimiliki terhadap dampak perubahan iklim berhasil diubah menjadi sumber legitimasi moral yang memberikan daya tawar diplomatik yang kuat di berbagai forum internasional. Posisi Maladewa sebagai salah satu negara yang paling rentan terhadap kenaikan permukaan laut menjadikan suaranya memiliki nilai moral dan politik yang penting dalam diskursus perubahan iklim global.

Pada tingkat multilateral, penelitian ini menemukan bahwa fokus utama diplomasi Maladewa adalah pada upaya meningkatkan kesadaran internasional mengenai ancaman kenaikan permukaan laut dan pada perjuangan untuk memperoleh keadilan iklim (*climate justice*) bagi negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Hal ini terlihat dari konsistensi Maladewa dalam mendorong target pembatasan suhu global sebesar 1,5 °C, peningkatan pendanaan iklim, penguatan agenda adaptasi, serta dukungan terhadap mekanisme *Loss and Damage*. Melalui forum seperti UNFCCC, COP, UNGA, dan AOSIS, Maladewa

berupaya memastikan bahwa kepentingan negara-negara kepulauan kecil tetap menjadi bagian dari agenda utama dalam perundingan iklim internasional. Dengan kata lain, diplomasi multilateral Maladewa paling dominan diarahkan pada pembentukan norma dan komitmen internasional yang lebih adil bagi negara-negara yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Sementara itu, pada tingkat bilateral, penelitian ini menemukan bahwa fokus kerja sama Maladewa paling dominan berada pada upaya memperoleh dukungan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pendanaan pembangunan dan pembangunan infrastruktur dimana, India dan Tiongkok berperan dominan dalam penyediaan pendanaan dan pembangunan infrastruktur tersebut. Selain itu, Jepang berkontribusi melalui transfer teknologi dan dukungan adaptasi, Inggris berfokus pada konservasi laut dan ketahanan ekosistem, sedangkan Jerman lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fungsi komunikasi lebih dominan dijalankan melalui diplomasi multilateral, terutama dalam membangun kesadaran global mengenai ancaman eksistensial yang dihadapi Maladewa akibat kenaikan permukaan laut. Fungsi representasi diwujudkan melalui upaya Maladewa menampilkan dirinya sebagai representasi negara-negara kepulauan kecil yang rentan terhadap perubahan iklim, sehingga memperoleh legitimasi moral dalam memperjuangkan agenda keadilan iklim. Sementara itu, fungsi negosiasi terlihat baik dalam diplomasi multilateral maupun bilateral, di mana Maladewa berupaya memperoleh komitmen internasional terkait pengurangan emisi, pendanaan iklim, serta dukungan teknis dan finansial untuk adaptasi. Temuan ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk diplomasi yang dijalankan Maladewa saling melengkapi dan memiliki keterkaitan satu sama lain.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan diplomasi iklim Maladewa tidak terletak pada kemampuannya memaksakan kepentingan melalui kekuatan material, melainkan pada kemampuannya membangun legitimasi moral, membentuk narasi internasional, serta memanfaatkan berbagai forum diplomatik untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Maladewa membuktikan bahwa negara kecil tetap dapat menjadi aktor yang berpengaruh dalam politik internasional

apabila mampu memanfaatkan diplomasi secara strategis. Dalam konteks perubahan iklim, kerentanan tidak selalu menjadi simbol kelemahan, tetapi dapat menjadi sumber kekuatan diplomatik yang memungkinkan negara kecil memperoleh perhatian, dukungan, dan pengaruh yang lebih besar dalam pembentukan agenda global.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian mengenai diplomasi iklim Maladewa dengan tidak hanya melihat peran negara sebagai aktor utama, tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan aktor non-negara seperti lembaga donor, NGO lingkungan, serta komunitas masyarakat sipil global. Hal ini penting karena dalam praktiknya, keberhasilan diplomasi iklim Maladewa tidak berdiri sendiri, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh dukungan berbagai pihak tersebut, terutama dalam hal pendanaan, advokasi, serta penguatan kapasitas adaptasi di negara-negara kecil kepulauan. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat melakukan perbandingan dengan *Small Island Developing States* (SIDS) lainnya untuk melihat perbedaan strategi serta faktor yang memengaruhi keberhasilan diplomasi iklim masing-masing negara. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai posisi negara kecil dalam sistem internasional, sekaligus memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana negara-negara rentan berupaya bertahan dan beradaptasi di tengah krisis iklim global.

Berdasarkan temuan penelitian ini, pengalaman diplomasi iklim Maladewa juga dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut akibat dari perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi risiko yang serupa, beberapa pulau kecil dilaporkan terancam tenggelam akibat abrasi, penurunan muka tanah, dan kenaikan permukaan laut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim juga berkaitan dengan keberlanjutan wilayah, masyarakat, dan kedaulatan negara. Pengalaman Maladewa menunjukkan bahwa kerentanan terhadap perubahan iklim dapat dijadikan dasar untuk memperkuat diplomasi internasional guna memperoleh dukungan

pendanaan, transfer teknologi, serta kerja sama adaptasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi iklimnya, baik melalui forum bilateral maupun multilateral, serta meningkatkan peran kepemimpinan dalam isu perubahan iklim global guna memperjuangkan kepentingan nasional dan melindungi wilayah-wilayah kepulauan yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. H., & Jaleel, M. (2024). Socioeconomic Ramifications of Sea Level Rise in the Maldives: A Holistic Assessment of Impacts and Adaptation Strategies. *Journal of Environmental and Geographical Studies*, 3(1), 1–16.
- Amores, A., Marcos, M., Pedreros, R., Le Cozannet, G., Lecacheux, S., Rohmer, J., Hinkel, J., Gussmann, G., Van Der Pol, T., Shareef, A., & Khaleel, Z. (2021). Coastal Flooding in the Maldives Induced by Mean Sea-Level Rise and Wind-Waves: From Global to Local Coastal Modelling. *Frontiers in Marine Science*, 8, 665672. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.665672>
- AOSIS. (2025). *Chair of Alliance of Small Island States (AOSIS)*. <https://aosis-83010600d5-drhubaxg6h7gce3ep.z03.azurefd.net/chair-of-aosis/>. Diakses pada 22 Mei 2026.
- Behera, S. K. (2024). Understanding the Impact of Climate Change on Extreme Events. *Frontiers in Science*, 2, 1433766. <https://doi.org/10.3389/fsci.2024.1433766>
- Berridge, G. R. (2010). *Diplomacy: Theory and Practice* (4th ed). Palgrave Macmillan.
- Betzold, C., Castro, P., & Weiler, F. (2015). AOSIS in the UNFCCC Negotiations: From Unity to Fragmentation? *Climate Policy*, 12(5), 591–613. <https://doi.org/10.1080/14693062.2012.692205>
- Bland, B., O’Sullivan, O., & Bajpae, C. (2025). Why the Indo-Pacific should be a higher priority for the UK. *Chatam House*.

- Brown, S., Wadey, M. P., Nicholls, R. J., Shareef, A., Khaleel, Z., Hinkel, J., Lincke, D., & McCabe, M. V. (2020). Land Raising as a Solution to Sea-Level Rise: An Analysis of Coastal Flooding on an Artificial Island in the Maldives. *Journal of Flood Risk Management*, 13(S1), e12567. <https://doi.org/10.1111/jfr3.12567>
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security: A New Framework for Analysis* (Nachdr.). Rienner.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4. ed). SAGE.
- De Biasio, V. (2025). Not Just ‘Sinking Islands’: Climate Change and Adaptation in Small Island Developing States. *Political Studies*, 73(4), 1370–1391. <https://doi.org/10.1177/00323217241298848>
- Dhunya, A., Huang, Q., & Aslam, A. (2017). *Coastal Habitats of Maldives: Status, Trends, Threats, and Potential Conservation Strategies*. 8(3).
- Doussis, E., & Dikaios, G. (2025). *Climate Diplomacy Under the UNFCCC: Past, Present and Future*. Dalam P. N. Perraki (Ed.), *Contemporary Diplomatic and Consular Relations: Selected Aspects*. Springer Nature Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-99243-8>
- Federal Foreign Office of Germany. (2023). *Strategy on Climate Foreign Policy*. <https://www.auswaertiges-amt.de/resource/blob/2633116/a4e03e8283b9479559ef2dc3b741624a/kap-strategie-en-data.pdf>
- Floyd, M., East, H. K., Traganos, D., Musthag, A., Guest, J., Hashim, A. S., Evans, V., Helber, S., Unsworth, R. K. F., & Suggitt, A. J. (2024). Rapid Seagrass

- Meadow Expansion in an Indian Ocean Bright Spot. *Scientific Reports*, 14(1), 10879. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-61088-1>
- Garrett, K. (2023). The Adaptive Capacity to Implement Climate Migration Policy in Response to Sea-Level Rise in the Maldives. *Capstone Collection*. <https://digitalcollections.sit.edu/capstones/3275>
- GCA. (2024). *Strategy and Planning to Redouble Adaptation in Small Island Developing States (SIDS): A Review (Conference Version)*. Global Center on Adaptation.
- Global Carbon Project. (2020). *Supplemental Data of Global Carbon Project 2020 (Version 1.0) [Dataset]*. Global Carbon Project. <https://doi.org/10.18160/GCP-2020>
- Hajjisa, A. N., & Charisya. (2025). Tuvalu's Foreign Policy Strategy: Confronting The Climate Crisis And The Country's Existential Threat. *Intermestic: Journal of International Studies*, 10(1), 129–153. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v10n1.7>
- Hananto, P. W. H., Trihastuti, N., Basir, S. M., Prananda, R. R., & Rizki, D. M. (2022). The Implication of Sea-level Rise Toward the Small Island Nation of Maldives: Legal Perspective. *Law Reform*, 18(2), 132–143. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.44698>
- Holmes, A., & Rofo, J. S. (2016). *Global Diplomacy: Theories, Types, and Models*. Routledge.
- IPCC. (2022). *The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (1st ed.)*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157964>

- IPCC. (2023). *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (1st ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157896>
- JICA. (2023). *The Project for Building Climate Resilient Safer Islands in the Maldives* (Detailed Planning Survey Report). https://www.jica.go.jp/Resource/english/our_work/social_environmental/id/asia/south/maldives/c8h0vm0000fecmf5-att/emo4vc000000wv5d.pdf
- Kelman, I. (2018). Islandness Within Climate Change Narratives of Small Island Developing States (SIDS). *Island Studies Journal*, 13(1), 149–166. <https://doi.org/10.24043/isj.52>
- Malatesta, S., & Friedberg, M. (2017). Environmental Policy and Climate Change Vulnerability in the Maldives: From the ‘Lexicon of Risk’ to Social Response to Change. *Island Studies Journal*, 12(1), 53–70. <https://doi.org/10.24043/isj.5>
- Maldivian Red Crescent. (2026). *Maldives* (pp. 1–15). IFRC Country Cluster Delegation for India, Sri Lanka, Bhutan and the Maldives. <https://share.google/pPPxt9IO94yIwUun7>
- Mikaelsson, M., Wibeck, V., & Linnér, B.-O. (2025). Navigating the Waves of Change: Framing Pacific Small Island Developing States within a Geopolitical and Climate Context. *Environmental Development*, 56, 101270. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2025.101270>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Edition 3). Sage.

Ministry of External Affairs. (2025). *India-Maldives Bilateral Relations*.
<https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Bilateral.pdf>

Ministry of Finance and Public Enterprises of the Republic of Maldives. (2018).
India Announces USD 1.4 Billion Assistance Package To Maldives.
<https://www.finance.gov.mv/media/news/india-announces-usd-14-billion-assistance-package-to-maldives>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2023). *New Plan for a “Free and Open Indo-Pacific (FOIP).”* https://www.mofa.go.jp/fp/pc/page3e_001336.html

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Maldives. (n.d). *Priorities and Issues*. <https://foreign.gov.mv/index.php/en/multilateral/priorities-and-issues/climate-change>

Moosa, A., Do, K., & Jonescu, E. (2020). Design Response To Rising Sea Levels In The Maldives: A Study Into Aquatic Architecture. *Frontiers of Architectural Research*, 9(3), 623–640.
<https://doi.org/10.1016/j.foar.2020.04.002>

Munnolimath, Kurungott, Asim, & Shamoon. (2025). *Green Finance Landscape and Access to Green Finance in the Tourism Sector in the Maldives*.
 Prevention of Marine Litter in the Lakshadweep Sea.
https://projectpromise.eu/system/files/document/maldives_green-finance-report_promise_fin.pdf

Naqiyyah, I. S. (2025). Asia Selatan dalam Pusaran Krisis Iklim: Implikasi Kenaikan Air Laut terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Bangladesh dan Maladewa. *Universitas Pendidikan Ganesha*, 9(12).

- NASA. (2024). *NASA Analysis Confirms 2023 as Warmest Year on Record*. NASA. <https://www.nasa.gov/news-release/nasa-analysis-confirms-2023-as-warmest-year-on-record/>. Diakses pada 12 September 2025.
- NASA Earth Observatory. (2021). *Preparing for Rising Seas in the Maldives*. <https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/preparing-for-rising-seas-in-the-maldives-148158/>. Diakses pada 26 April 2026.
- NBC News. (2009). *Cabinet Makes Splash with Underwater Meeting*. <https://www.nbcnews.com/id/wbna33354627>. Diakses pada 12 September 2025.
- OECD. (2024). *The New Collective Quantified Goal on Climate Finance: Options for Reflecting the Role of Different Sources, Actors, and Qualitative Considerations* (OECD/IEA Climate Change Expert Group Papers 2024/02; OECD/IEA Climate Change Expert Group Papers, Vol. 2024/02). <https://doi.org/10.1787/7b28309b-en>
- Ourbak, T., & Magnan, A. K. (2018). The Paris Agreement and Climate Change Negotiations: Small Islands, Big Players. *Regional Environmental Change*, 18(8), 2201–2207. <https://doi.org/10.1007/s10113-017-1247-9>
- Permanent Mission of Maldives to the United Nations. (n.d). *UNGA Statements*. Permanent Mission of the Republic of Maldives to the United Nations. http://www.maldivesmission.com/statements/unga_statements
- Perry, C. T., Alvarez-Filip, L., Graham, N. A. J., Mumby, P. J., Wilson, S. K., Kench, P. S., Manzello, D. P., Morgan, K. M., Slangen, A. B. A., Thomson, D. P., Januchowski-Hartley, F., Smithers, S. G., Steneck, R. S., Carlton, R., Edinger, E. N., Enochs, I. C., Estrada-Saldívar, N., Haywood, M. D. E.,

- Kolodziej, G., ... Macdonald, C. (2018). Loss of Coral Reef Growth Capacity to Track Future Increases in Sea Level. *Nature*, 558(7710), 396–400. <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0194-z>
- Ranjan, A. (2021). *Rising Sea Levels: Threat for the Maldives*. ISAS Briefs. <https://www.isas.nus.edu.sg/papers/rising-sea-levels-threat-for-the-maldives/>
- Rayfuse, R. (2010). International Law and Disappearing States: Utilising Maritime Entitlements to Overcome the Statehood Dilemma. *University of New South Wales*, 52. <http://ssrn.com/abstract=1704835>
- Roberts, E., & Pelling, M. (2018). Climate Change-Related Loss and Damage: Translating the Global Policy Agenda for National Policy Processes. *Climate and Development*, 10(1), 4–17. <https://doi.org/10.1080/17565529.2016.1184608>
- Sahoo, P. (2023). Significance of South Asian Island Nations in India's Geopolitical Strategy. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 04(04), 1147–1149. <https://doi.org/10.54660/IJMRGE.2023.4.4.1147-1149>
- Sakamoto, A., Nishiya, K., Guo, X., Sugimoto, A., Nagasaki, W., Doi, K., & Global Infrastructure Fund Research Foundation Japan Roppongi T-Cube 14F, 3-1-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, Japan. (2022). Mitigating Impacts of Climate Change Induced Sea Level Rise by Infrastructure Development: Case of the Maldives. *Journal of Disaster Research*, 17(3), 327–334. <https://doi.org/10.20965/jdr.2022.p0327>

- Shah, P. I. A., & Dar, Z. A. (2025). India's Strategic Engagement in the Indo-Pacific: A Blueprint for Regional Security. *South India Journal of Social Sciences*, 23(5).
- Shivamurthy, A., & Lunawat, U. (2025). *The Changing Nature of China's Engagement in the Maldives*. <https://www.orfonline.org/expert-speak/cultivating-dependency-the-changing-nature-of-china-s-engagement-in-the-maldives>
- Sinaga, M., & Yusril, Y. (2021). Dampak Perubahan Iklim di Pasifik Selatan: Ancaman Naiknya Permukaan Air Laut Terhadap Eksistensi Negara dan Penduduk Kiribati. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 1(1), 29–43. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v1i1.1672>
- Singh, S. (2022). *Maldives-China Relations: A Multidimensional Cooperation in the Indian Ocean* [Organisation for Research on China and Asia]. <https://orcasia.org/article/202/maldives-china-relations>
- Small, J., Kettle, E., Hardman, E., Flavell, B., & Rahman, M. (2023). *Report of Protected Area Management Effectiveness Evaluations for Three Sites in the Maldives* (pp. 1–73) [Ocean Country Partnership Programme]. <https://protectedareas.environment.gov.mv/storage/uploads/eJYk0QqR/gioreo6c.pdf>
- Sovacool, B. K. (2012). Perceptions Of Climate Change Risks And Resilient Island Planning In The Maldives. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 17(7), 731–752. <https://doi.org/10.1007/s11027-011-9341-7>

- Stevens, G. M. W., & Froman, N. (2019). The Maldives Archipelago. In *World Seas: An Environmental Evaluation* (pp. 211–236). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100853-9.00010-5>
- Subiyanto, A. (2024). Diplomasi Iklim: Upaya Menyelamatkan Bumi dari Krisis Iklim? *PENDIPA Journal of Science Education*, 8(1), 27–34. <https://doi.org/10.33369/pendipa.8.1.27-34>
- The Guardian. (2022). *Cop27: Is It Right to Talk of ‘Reparations’?* <https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/18/cop27-is-it-right-to-talk-of-reparations>. Diakses pada 22 Mei 2026.
- The President’s Office Republic of Maldives. (2021). *Remarks by His Excellency Ibrahim Mohamed Solih, President of the Republic of Maldives at the 26th Session of the Conference of the Parties (COP26) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) held in Glasgow, Scotland*. <https://presidency.gov.mv/Press/Article/25643>
- The President’s Office Republic of Maldives. (2022). *The Vice President Calls for Global Solidarity in the Face of Climate Change*. <https://presidency.gov.mv/Press/Article/27561>. Diakses pada 26 April 2026.
- The President’s Office Republic of Maldives. (2023). *The President Meets with the German President*. <https://presidency.gov.mv/Press/Article/28109>. Diakses pada 26 April 2026.
- UNFCCC. (2019). *Maldives First Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (pp. 1–131). Ministry of Environment. <https://unfccc.int/documents/257130>

- UNFCCC. (2020). *Update of Nationally Determined Contribution of Maldives*. 1–20. Diakses pada 26 April 2026.
- UNFCCC. (2022). *COP27 Reaches Breakthrough Agreement on New “Loss and Damage” Fund for Vulnerable Countries*. <https://unfccc.int/news/cop27-reaches-breakthrough-agreement-on-new-loss-and-damage-fund-for-vulnerable-countries>
- UN-OHRLLS. (2020). *Small Island Developing States in Numbers: Oceans Edition 2020* [Institutional Report]. United Nations.
- Wahyudin, B. (2020). Ancaman Kenaikan Muka Air Laut Bagi Negara-Negara Di Kepulauan Pasifik. *Review of International Relations*, 2(1). <https://doi.org/10.24252/rir.v2i1.15421>
- White, I., & Falkland, T. (2010). Management Of Freshwater Lenses On Small Pacific Islands. *Hydrogeology Journal*, 18(1), 227–246. <https://doi.org/10.1007/s10040-009-0525-0>
- World Bank. (2022). *Maximizing Finance for Development*. Washington, DC. <https://doi.org/10.1596/37100>. Diakses pada 26 April 2026.
- World Bank. (2024a). *Climate Change Threatens Maldives’ Fisheries and Tourism, Urgent Adaptation Needed*. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/09/13/climate-change-threatens-maldives-fisheries-and-tourism-urgent-adaptation-needed>
- World Bank. (2024b). *Maldives Country Climate and Development Report*. <https://www.worldbank.org/en/country/maldives/publication/key-highlights-maldives-country-climate-and-development-report>

World Bank Group. (2021). *Maldives: Systematic Country Diagnostic Update* (Systematic Country Diagnostic). International Bank for Reconstruction and Development. <http://hdl.handle.net/10986/35512>